



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

**BBPPMD
JAKARTA**

**BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI JAKARTA**

**BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan laporan kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah yang dilaporkan setiap triwulan. Laporan Kinerja dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017

Dengan telah berjalannya program dan kegiatan Tahun 2023 maka Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta menyusun laporan kinerja sebagai media pertanggungjawaban dalam mengukur keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024.

Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Bulan Desember tahun 2023 secara keseluruhan rata-rata adalah sebesar 102, 62%. Besar capaian kinerja memiliki nilai lebih kecil dari target yang diharapkan yakni 100,00 %. yang terdiri dari 14 indikator kinerja sasaran, yakni :

- a. Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023 mencapai sebesar 100,00%;
- b. Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023 mencapai sebesar 100,00%;
- c. Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023 mencapai sebesar 100,00%;
- d. Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitasi dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan mencapai sebesar 100,00%;
- e. Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat mencapai sebesar 100,00%;
- f. Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023 mencapai sebesar 100,00%;
- g. Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun mencapai sebesar 100,00 %;

- h. Jumlah Dokumen perencanaan mencapai sebesar 100,00 %;
- i. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan mencapai sebesar 100,00 %;
- j. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMD Jakarta mencapai sebesar 103,40%;
- k. Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun mencapai sebesar 100,00 %;
- l. Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun mencapai sebesar 133,33 %;
- m. Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun mencapai sebesar 100,00 %;
- n. Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun mencapai sebesar 100,00 %;

Akhir kata, semoga laporan kinerja BBPPMD Jakarta tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Jakarta, Desember 2023

Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Jakarta



Dr. Enirawan, S.P., M.Si.
NIP. 19770802 200210 1 001

DAFTAR ISI		HAL
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
IKHTISAR EKSEKUTIF		1
BAB I	PENDAHULUAN	13
	A Latar Belakang	13
	B Kedudukan dan Fungsi	15
	C Aspek Strategis	19
	D Permasalahan Utama (Strategic Issue)	21
	E Struktur Organisasi	22
	F Sistematika Penyajian	24
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	26
	A Rencana Strategis Kemendes 2020 – 2024	26
	B Rencana Strategis BPSDM	28
	C Rencana Strategis BBPPMD	29
	D Rencana Kerja Tahun 2022	41
	E Penetapan Kinerja Tahun 2022	44
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	47
	A Capaian Kinerja Organisasi	47
	B Realisasi Anggaran	73
	C Saran	74
BAB V	PENUTUP	75
LAMPIRAN – LAMPIRAN		

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Tugas BBPPMD Jakarta tersebut di atas diwujudkan dalam program dan kegiatan, yang pada akhir kegiatan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat, hal ini menyiratkan bahwa wujud akuntabilitas dari BBPPMD Jakarta adalah mempertanggungjawabkan hasil akhir atau manfaat dari suatu program dan kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat bukan sekedar menyatakan bahwa program dan kegiatan telah terlaksana, namun yang penting adalah program dan kegiatan BBPPMD Jakarta tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dampak yang mampu membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta Tahun 2023 menyajikan tentang keberhasilan dan kegagalan BBPPMD Jakarta dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2023 yang dilakukan dalam upaya mewujudkan Visi BBPPMD Jakarta **“Terwujudnya perdesaan yang mempunyai keunggulan kolaboratif dan berdaya saing”** yang mengacu pada pernyataan Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. misi Balai Besar

Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta juga mengacu pada misi Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dijabarkan dalam sembilan program Kementerian Tahun 2022 – 2024 yaitu :

- a. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
- b. Meningkatkan penatalaksanaan ekonomi dan investasi perdesaan
- c. Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi
- d. Menyeraskan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal
- e. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan
- f. Meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih

Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta telah menyusun kebijakan program, sasaran dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam renstra Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta. Renstra Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta dijadikan dasar untuk pengukuran capaian kinerja yang meliputi Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel : 1
TARGET KINERJA BBPPMD JAKARTA
TAHUN 2023

No	Program	Sasaran Strategis	Output	Target Setahun		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				T	%	T	%	T	%	T	%	T	%
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Terlaksananya pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	330	100,00	90	27,27	210	63,64	330	100,00	330	100,00
2		Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	27	100,00	0	-	0	-	27	100,00	27	100,00
3			Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023	630	100,00	0	-	0	-	300	47,62	630	100,00
4		Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Melalui Pendampingan	Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitasi dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan	8	100,00	0	-	0	-	5	62,50	8	100,00

No	Program	Sasaran Strategis	Output	Target Setahun		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				T	%	T	%	T	%	T	%	T	%
5		Terlaksananya pendampingan masyarakat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat	85%	100,00	0	-	0	-	0%	-	85%	100,00
6		Terlaksananya kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023	1	100,00	0	-	0	-	0	-	1	100,00
7		Terpenuhinya dokumen pendukung yang disusun dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun	12	100,00	3	25,00	6	50,00	9	75,00	12	100,00
8			Jumlah Dokumen perencanaan	2	100,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00	2	100,00

No	Program	Sasaran Strategis	Output	Target Setahun		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				T	%	T	%	T	%	T	%	T	%
9			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan	28	100,00	5	17,86	10	35,71	16	57,14	28	100,00
10			Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMD Jakarta	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00
11		Terwujudnya Pelayanan Publik ASN lingkup BBPPMDDTT Jakarta atas pelayanan dukungan manajemen	Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	12	100,00	3	25,00	6	50,00	9	75,00	12	100,00
12			Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	75%	100,00	10%	13,33	25%	33,33	50%	66,67	75%	100,00

No	Program	Sasaran Strategis	Output	Target Setahun		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				T	%	T	%	T	%	T	%	T	%
13			Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	12	100,00	3	25,00	6	50,00	9	75,00	12	100,00
14			Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	12	100,00	3	25,00	6	50,00	9	75,00	12	100,00

Tabel : 2

CAPAIAN KINERJA BBPPMD JAKARTA TAHUN 2023

No	Program	Sasaran Strategis	Output	Terhadap Target Triwulan 4				Selisih		Terhadap Target Tahunan				Selisih	
				T	%	R	%	S	%	T	%	R	%	S	%
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Terlaksananya pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	330,00	100,00	330,00	100,00	-	-	330,00	100,00	330,00	100,00	-	-
2		Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	27,00	100,00	27,00	100,00	-	-	27,00	100,00	27,00	100,00	-	-
3			Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023	630,00	100,00	630,00	100,00	-	-	630,00	100,00	630,00	100,00	-	-
4		Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Melalui Pendampingan	Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitasi dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan	8,00	100,00	8,00	100,00	-	-	8,00	100,00	8,00	100,00	-	-
5		Terlaksananya pendampingan masyarakat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat	0,85	100,00	0,85	100,00	-	-	0,85	100,00	0,85	100,00	-	-

No	Program	Sasaran Strategis	Output	Terhadap Target Triwulan 4				Selisih		Terhadap Target Tahunan				Selisih	
				T	%	R	%	S	%	T	%	R	%	S	%
6		Terlaksananya kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023	1,00	100,00	1,00	100,00	-	-	1,00	100,00	1,00	100,00	-	-
7		Terpenuhinya dokumen pendukung yang disusun dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun	12,00	100,00	12,00	100,00	-	-	12,00	100,00	12,00	100,00	-	-
8			Jumlah Dokumen perencanaan	2,00	100,00	2,00	100,00	-	-	2,00	100,00	2,00	100,00	-	-
9			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan	28,00	100,00	28,00	100,00	-	-	28,00	100,00	28,00	100,00	-	-
10			Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMD Jakarta	90,00	100,00	93,06	103,40	3,06	3,40	90,00	100,00	93,06	103,40	3,06	3,40
11		Terwujudnya Pelayanan Publik ASN lingkup BBPPMDTT Jakarta atas pelayanan dukungan manajemen	Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	12,00	100,00	12,00	100,00	-	-	12,00	100,00	12,00	100,00	-	-
12			Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	0,75	100,00	1,00	133,33	0,25	33,33	0,75	100,00	1,00	133,33	0,25	33,33
13			Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	12,00	100,00	12,00	100,00	-	-	12,00	100,00	12,00	100,00	-	-
14			Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	12,00	100,00	12,00	100,00	-	-	12,00	100,00	12,00	100,00	-	-
			Rata-rata		100,00		102,62		2,62		100,00		102,62		2,62

Berdasarkan data pada table 2 diatas, diketahui bahwa :

1. Capaian Kinerja Terhadap Target Triwulan 4

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta pada Triwulan ke-4 secara keseluruhan rata-rata adalah sebesar 102,62%. Besar capaian kinerja memiliki nilai lebih besar dari target yang diharapkan yakni 100,00%. yang terdiri dari 14 indikator kinerja sasaran, yakni :

- a. Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023 mencapai sebesar 100,00%;
- b. Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023 mencapai sebesar 100,00%;
- c. Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023 mencapai sebesar 100,00%;
- d. Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitas dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan mencapai sebesar 100,00%;
- e. Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat mencapai sebesar 100,00%;
- f. Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023 mencapai sebesar 100,00%;
- g. Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun mencapai sebesar 100,00 %;
- h. Jumlah Dokumen perencanaan mencapai sebesar 100,00 %;
- i. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan mencapai sebesar 100,00 %;
- j. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMD Jakarta mencapai sebesar 103,40%;
- k. Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun mencapai sebesar 100,00 %;

- l. Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun mencapai sebesar 133,33 %;
- m. Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun mencapai sebesar 100,00 %;
- n. Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun mencapai sebesar 100,00 %;

2. Capaian Kinerja Terhadap Target Tahunan

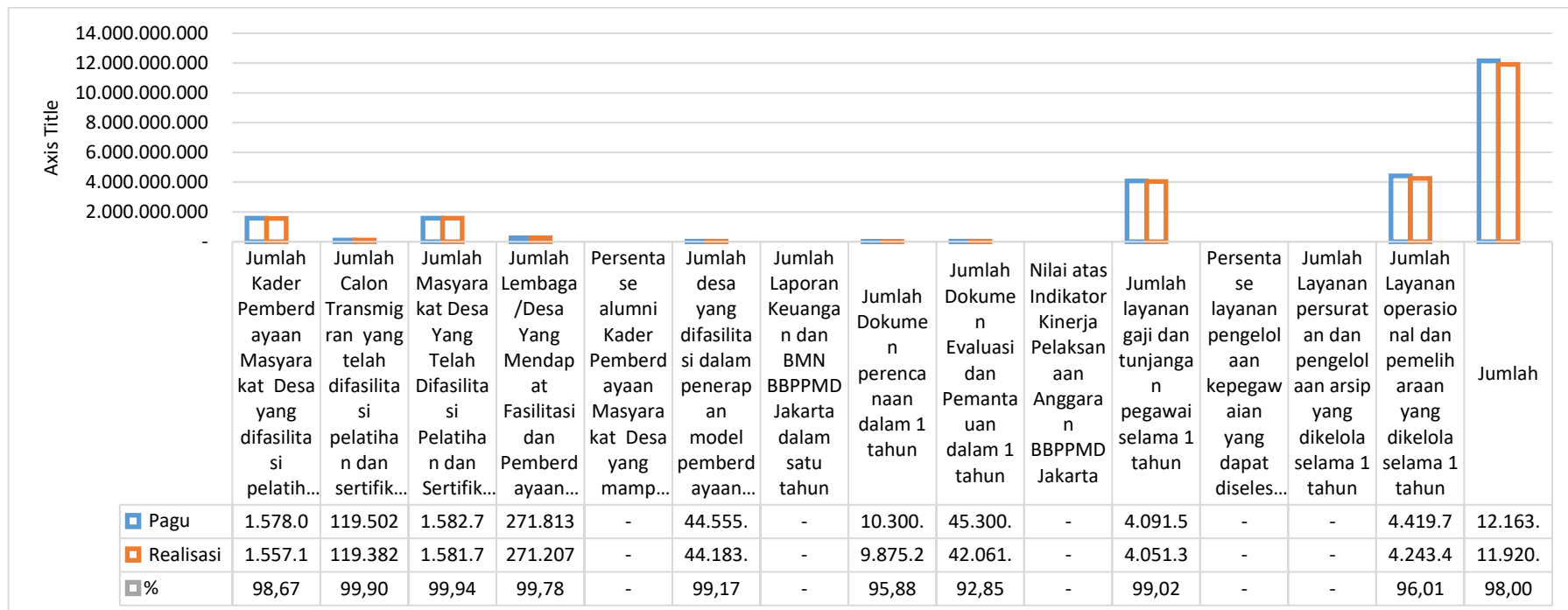
Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta secara keseluruhan rata-rata adalah sebesar 102, 62%. Besar capaian kinerja memiliki nilai lebih kecil dari target yang diharapkan yakni 100,00 %. yang terdiri dari 14 indikator kinerja sasaran, yakni :

- a. Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023 mencapai sebesar 100,00%;
- b. Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023 mencapai sebesar 100,00%;
- c. Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023 mencapai sebesar 100,00%;
- d. Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitas dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan mencapai sebesar 100,00%;
- e. Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat mencapai sebesar 100,00%;
- f. Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023 mencapai sebesar 100,00%;
- g. Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun mencapai sebesar 100,00 %;
- h. Jumlah Dokumen perencanaan mencapai sebesar 100,00 %;

- i. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan mencapai sebesar 100,00 %;
- j. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMD Jakarta mencapai sebesar 103,40%;
- k. Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun mencapai sebesar 100,00 %;
- l. Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun mencapai sebesar 133,33 %;
- m. Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun mencapai sebesar 100,00 %;
- n. Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun mencapai sebesar 100,00 %;

Tabel : 3

**CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE- IV
BBPPMD JAKARTA
TAHUN 2023**



Berdasarkan data pada tabel 3 diatas, diketahui bahwa Realisasi anggaran dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023 dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.163.588.000,- adalah sebesar Rp.11.920.304.778,- atau 98,00%. Sisa anggaran sebesar Rp.243.223.222,- atau 2,00%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BBPPMD) Jakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam kedudukannya, BBPPMD Jakarta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BBPPMD Jakarta sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta memiliki wilayah kerja yang telah ditentukan. Berdasarkan fungsinya memiliki 5 (lima) wilayah kerja, yakni : DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Kalimantan Barat.

Setelah bergabung dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BBPPMD) Jakarta berupaya melatih Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang dapat memfasilitasi masyarakat desa menjadi lebih

sejahtera. Kemandirian desa tergantung dari kesejahteraan masyarakat desanya semakin sejahtera, semakin mandiri desanya

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan, ketrampilan kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi (Permendes No. 3 / 2015 tentang pendampingan desa). Implementasi dari tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta tersebut adalah melakukan pengembangan pelatihan masyarakat, tenaga kepelatihan dan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat termasuk kerjasama dengan lembaga/unit-unit yang melakukan pelatihan masyarakat baik UPTP-UPTD yang membawahi pelatihan masyarakat di daerah. Pada tahun 2023, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta telah menyusun program yang telah dituangkan dalam DIPA Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta Tahun 2023.

Dalam rangka pemberdayaan terhadap lembaga pelatihan masyarakat, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta telah memprogramkan kegiatan untuk memberdayakan para pelatih dan para pengelola pelatihan melalui bimbingan teknis yang diarahkan pada pelayanan publik yang bersifat tidak langsung (*indirect services*), perangkat lunak berupa penyusunan kurikulum, yang diperlukan dalam melakukan pelatihan masyarakat.

Sedangkan pelayanan yang bersifat langsung (*direct services*) terhadap masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan pelatihan, pendampingan dan uji terapan bagi masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi.

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, maka kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan, organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

BBPPMD Jakarta merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan

Kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
2. Pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Balai Besar.

Dalam melaksanakan fungsi seperti tersebut diatas, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai peran yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana, program dan anggaran fasilitasi dan pelatihan pengembangan SDM;
Kegiatan penyiapan program fasilitasi dan pelatihan pengembangan SDM dibidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi di susun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan pengembangan masyarakat.
2. Penyusunan Rencana, program dan anggaran fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat;
Kegiatan penyiapan program fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat dibidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi disusun berdasarkan hasil Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan perencanaan pengembangan masyarakat.
3. Penyusunan Rencana, program dan anggaran model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
Kegiatan penyiapan program model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi disusun berdasarkan perencanaan pengembangan masyarakat.
4. Pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan SDM;
Kegiatan fasilitasi dan pelatihan pengembangan SDM merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
5. Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat;

Kegiatan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan untuk mendampingi masyarakat khususnya alumni pelatihan dalam melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL), mempraktekkan dan mengembangkan hasil pelatihan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki di Desa, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

6. Penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan uji coba model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang telah diprogramkan, agar dihasilkan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang diberikan dapat berhasil guna dan berdaya guna serta aplikatif sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi dan pelatihan pengembangan SDM;
Kegiatan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi dan pelatihan pengembangan SDM dilakukan guna memperoleh bahan informasi untuk perbaikan dan pengembangan program fasilitasi dan pelatihan pengembangan SDM selanjutnya.
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat;
Kegiatan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat dilakukan guna memperoleh bahan informasi untuk perbaikan dan pengembangan program fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat selanjutnya.

9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Kegiatan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilakukan guna memperoleh bahan informasi untuk perbaikan dan pengembangan program model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi selanjutnya.

C. ASPEK STRATEGIS

1. Dukungan Personil

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi didukung oleh personil sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang yang terdiri dari : 29 (dua puluh sembilan) orang ASN dan 30 (tiga puluh) orang Non ASN

2. Dukungan Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
I	GEDUNG KANTOR	
	1. Gedung A/Kantor	1 unit
	2. Gedung B/Ruang Kelas	1 unit
	3. Gedung C/Asrama	1 unit
II	KENDARAAN OPERASIONAL	
	1. Roda 4	6 unit
	2. Roda 2	9 unit
	3. Roda 3	2 unit
III	PRASARANA PELATIHAN	
	1. LCD Projector/Infocus	16 unit
	2. Komputer	39 unit
	3. Laptop	25 unit
	4. Printer	28 unit
IV	GEDUNG TEMPAT PELATIHAN	
	1. Ruang Aula	1 lokal
	2. Ruang Kelas	2 lokal
	3. Ruang Perpustakaan	1 lokal
	4. Ruang Makan	1 lokal
	5. Asrama Siswa Kapasitas 104 orang (52 kamar)	52 kamar
	6. Ruang Dapur	1 lokal
	7. Ruang Gudang	1 lokal
	8. Ruang Petugas	1 unit
	9. Pos Jaga	1 unit
	10. Mushola	1 unit
	11. Guest House	2 unit
	12. Demplot (kolam, lahan hortikultura, hidroponik)	4000 m ²
	13. Ruang Praktik/Workshop	1 unit
	14. Kandang Sapi	56 m ²
	15. Kandang Kambing	11,25 m ²
	16. Ruang Genset	24 m ²
	17. Ruang Rapat	1 lokal

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam mencapai kinerjanya, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta mengalami beberapa masalah dan kendala yaitu:

1. Revisi Automatic Adjustment TA 2023 Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor : 919/KEU.00.06/XII/2022 Tanggal 19

Desember 2022. Nilai Anggaran Yang Diblokir Revisi AA adalah sebesar Rp.2.450.928.000 yang berasal dari :

- 6467.DCJ.022 Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilatih secara Blended sebesar Rp.2.137.930.000 (610 orang)
 - 6459.EBA.994.C Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja) sebesar Rp.312.998.000 (Tunkin 13 dan 14)
2. Terdapat perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi dan juga validasi dari Kanwil KPPN VII terkait dengan perubahan yang terjadi.
 3. Terdapat perubahan lokus kegiatan pelatihan menyesuaikan dengan data dari Biro Perencanaan (data terkait permintaan komisi V), sehingga perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait (Dinas PMD Kabupaten dan Desa)
 4. Revisi Blokir Anggaran Automatic Adjustment mengakibatkan penilaian capaian kinerja bulanan yang kurang baik bagi satker BBPPMD Jakarta karena besar pagu dan output tidak berubah (posisi blokir) sedangkan realisasi keuangan dan fisik setiap bulan tidak dapat maksimal dilakukan karena menunggu pemblokiran dibuka/dihapuskan.
 5. Revisi Buka Blokir Tahap ke - I dilakukan pada bulan Agustus yakni Pelatihan Bumdes Blended sebanyak 16 Angkatan sebesar Rp.1.580.000.000 dan masih terdapat sisa anggaran yang masih diblokir : Rp.557.930.000.
 6. Revisi Buka Blokir Tahap ke - II dilakukan pada bulan September yakni Pelatihan Bumdes Blended sebanyak 4 Angkatan sebesar Rp.557.930.000 dan tidak terdapat sisa Anggaran Yang Masih Diblokir.

7. Dilakukannya buka blokir mendekati akhir tahun kegiatan mengakibatkan terjadinya penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran sehingga terjadi kesulitan dalam menyusun perencanaan penarikan dana dan juga pembagian tugas kepada personil pelaksana kegiatan (dikarenakan keterbatasan personil dan waktu penyelesaian pekerjaan)
8. Tidak dilakukannya Rapat Pengendalian Internal BBPPDM Jakarta secara berkala terkait evaluasi kegiatan dan keuangan yang telah berjalan sehingga terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan pada setiap bulannya dan mengalami penumpukan pekerjaan diakhir tahun anggaran

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI JAKARTA**



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta didukung oleh 2 Bagian :

1. Bagian Tata Usaha, Tugas :

melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Balai Besar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan Balai Besar;
- b. pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat;

- c. koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern; dan
- d. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, tata persuratan dan kearsipan, serta urusan kerumahtanggaan Balai Besar.

Bagian tata usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern serta evaluasi dan pelaporan Balai Besar.
- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, tata persuratan dan kearsipan, serta urusan kerumahtanggaan Balai Besar.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LAPKIN Triwulan BBPPMD Jakarta Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah, sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Merupakan ikhtisar yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil dan langkah antisipasinya.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara singkat ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan mengenai penyajian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan dari LAPKIN dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana pelaksanaan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Renstra Kemendes Tahun 2020 - 2024
2. Renstra BPSDM Tahun 2020 - 2024
3. Renstra BBPPMD Jakarta Tahun 2020 - 2024
4. Penetapan Kinerja Tahun 2023

A. RENCANA STRATEGIS KEMENDES 2020 - 2024

Sasaran strategis Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
<i>“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.</i>	Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;	Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan	Berkembangnya status pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah desa mandiri • Jumlah desa berkembang • Jumlah desa tertinggal
			Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks rata-rata perkembangan 62 KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) • Indeks rata-rata perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
			Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase kemiskinan di perdesaan
	Mengembangkan ekonomi dan investasi di Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;	Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Bumdes berkembang • Jumlah Bumdes maju
			Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Bumdes Bersama berkembang • Jumlah Bumdes Bersama maju
			Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi	Persentase kenaikan investasi di perdesaan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan menurut indeks keteringgalan
			Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal
			Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal	Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal
	Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;	Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi Rata-rata indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi
	Mengembangkan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaan rencana untuk	<ul style="list-style-type: none"> Persentase dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan,

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	berbasis data dan informasi yang akurat	pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.	meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi
	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan
	Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Reformasi Birokrasi Nilai kesehatan organisasi Persentase pelaksanaan e-government (SPBE) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks Penerapan Sistem Merit

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
			Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Nilai integritas Nilai SAKIP Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

B. RENCANA STRATEGIS BPSDM

Sasaran strategis BPSDM yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan rata-rata kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP);
2. Meningkatkan kapasitas jumlah TPP;
3. Meningkatkan kompetensi TPP;
4. Meningkatkan Pelatihan SDM aparatur ang kompeten yang lulus dan bersertifikat;
5. Meningkatkan Prosentase SDM aparatur yang mengikuti pelatihan teknis bersertifikat;
6. Meningkatkan kompetensi SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
7. Meningkatkan kader pemberdayaan masyarakat desa yang bersertifikat;
8. Meningkatkan SDM yang mengakses platform Akademi Desa 4.0;
9. Meningkatkan NSPK pengembangan profesi jabatan fungsional tertentu;
10. Meningkatkan presentasi pejabat fungsional yang mengikuti pengembangan profesi jabatan fungsional tertentu ;
11. Meningkatkan jumlah dokumen evaluasi jabatan dan penilaian pejabat fungsional tertentu

C. RENCANA STRATEGIS BBPPMD JAKARTA

Tabel 5
Rencana Strategis
Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta
Tahun 2020 – 2024

Sasaran Strategis Kemendesa	Sasaran Strategis BPSDM	Sasaran Strategis BBPPMD Jakarta	Indikator Kinerja BBPPMD Jakarta		2020		2021		2022		2023		2024	
1. Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berintegritas dan Berkompeten	Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berintegritas dan berkompeten	Terlaksananya pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat	60	Org	1.820	Org	1720	Org	210	Org	300	Org
2. Meningkatnya kualitas kapasitas SDM Perdesaan														

Sasaran Strategis Kemendesa	Sasaran Strategis BPSDM	Sasaran Program BBPPMD Jakarta	Indikator Kinerja BBPPMD Jakarta		2020		2021		2022		2023		2024		
		Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	2	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat	155	Org	155	Org	155	Org	80	Org	30	Org	
				3	Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023	0	Org	0	Org	0	Org	610	Org	0	Org
					4	Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitas dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan	0	lem	0	lem	0	lem	8	lem	1
		Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan Melalui Pendampingan	5	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat		0	%	0	%	85,00	%	85,00	%	85,00	%

		Terlaksananya pendampingan masyarakat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	6	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan	0	desa	0	desa	3	desa	1	desa	1	desa
		Terlaksananya kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	7	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun	12	bln	12	bln	12	bln	12	bln	12	bln
	Terwujudnya Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bersih,	Terpenuhinya dokumen pendukung yang disusun dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	8	Jumlah Dokumen perencanaan	2	pkt	2	pkt	2	pkt	2	pkt	2	pkt

akuntabel dan berkinerja tinggi		9	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan	17	pkt	17	pkt	17	pkt	17	pkt	17	pkt
		10	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMD Jakarta	76.5	%	76.5	%	76.5	%	90,0 0	%	90,0 0	%
		11	Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	12	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln
	Terwujudnya Pelayanan Publik ASN lingkup BBPPMDDTT Jakarta atas pelayanan dukungan manajemen	12	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	75,0 0	%	75,0 0	%	75,0 0	%	75,0 0	%	75,0 0	%

			13	Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	12	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln
			14	Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	12	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln

Perencanaan Strategis Tahun 2022 – 2024 BBPPMD Jakarta disusun dalam rangka pemenuhan tugas, yaitu melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Perencanaan Strategis ini disusun dalam koridor Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis ini, pemenuhan tugas dan fungsi BBPPMD Jakarta dapat dilakukan secara terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Perencanaan Strategis bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Perencanaan Strategis BBPPMD Jakarta disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan mendasari kegiatan organisasi sehari – hari dan akan menjadi ajang interaksi dan komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

BBPPMD Jakarta sebagai unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Badan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharapkan mampu untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga pelatihan ketransmigrasian baik pusat maupun daerah. Dalam rangka menunjang dan membantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam menuju kesuksesan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, BBPPMD Jakarta menyusun visi dan misi untuk menunjukkan jati diri dan fungsinya sebagai unit yang akan mampu mendorong kinerja lembaga pelatihan sebagai berikut :

1. VISI

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan mengemban amanat yang menjadi tugas dan fungsinya, yang senantiasa

terus – menerus berperan dalam meningkatkan pelayanan yang bersifat langsung (*direct services*) terhadap masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan pelatihan dan pemberdayaan bagi masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi, maka Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta dalam mewujudkan cita-citanya dituangkan dalam visi sebagai berikut :

“Terwujudnya perdesaan yang mempunyai keunggulan kolaboratif dan berdaya saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong ”

Pernyataan visi ini mengacu pada pernyataan visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi. “Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pengertian dari visi tersebut adalah :

- a. Perdesaan adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- b. Keunggulan Kolaboratif adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif, bermanfaat, dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing.

- c. Keunggulan Daya Saing adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di tingkat regional maupun internasional.
- d. Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong- royong: merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yang wajib didukung oleh visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

2. MISI

Misi BBPPMD Jakarta sama dengan misi BPSDM, yakni sama seperti halnya dengan proses penyusunan Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, bahwa batasan operasional menjadi hal yang harus diperhatikan. Misi harus memberikan gambaran mengenai rumusan umum upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

1. **Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;**
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan transmigrasi;
5. **Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat**
6. **Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan; dan**
7. Meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik.

BPSDM menjadikan ketujuh misi tersebut menjadi misi utamanya dengan memfokuskan pada misi ke-1 yaitu mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Misi ke-5 yaitu penyusunan kebijakan strategis

berbasis data dan informasi yang akurat, serta misi ke-6 yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan.

Sesuai Visi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis; memiliki kewenangan penuh untuk mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa

BPSDM bertekad mengawal implementasi UU Desa dengan fokus pada misi kedua yaitu mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; misi keempat yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; serta misi ketujuh yaitu mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

3. SASARAN

Tujuan yang ingin dicapai oleh BBPPMD Jakarta dalam kurun waktu 2020-2024 adalah dengan menyelaraskan tujuan dari BPSDM. Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut: adalah:

- 1) Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
- 2) Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
- 3) Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan Kawasan Perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta mendorong penurunan kemiskinan di perdesaan;
- 4) Terwujudnya Kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
- 5) Terentaskannya daerah tertinggal.

- 6) Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan;
- 7) Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul; dan
- 8) Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Selaras dengan tujuan yang ingin dicapai BPSDM tersebut, BBPPMD Jakarta pada kurun waktu 2020-2024 memiliki tujuan:

- 1) Pelaksanaan kegiatan dan program di bidang pelatihan masyarakat desa dan kader pemberdayaan masyarakat serta pendampingan bagi peningkatan produktivitas masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi;
- 2) Pelayanan pelatihan mandiri di Balai baik untuk masyarakat umum, difabel, mahasiswa maupun pensiunan;
- 3) Pendampingan beberapa Bumdes yang ada di wilayah kerja menuju e-market
- 4) Terwujudnya masyarakat calon transmigran yang berpengetahuan dan handal dalam menghadapi lahan pemukiman baru;
- 5) Terwujudnya sumberdaya manusia perdesaan yang unggul dan kreatif berwirausaha;
- 6) Peningkatan kompetensi SDM Balai (ASN) agar lebih produktif dan profesional;
- 7) Terwujudnya tata Kelola organisasi yang baik, bersih, efektif, dan kredibel

4. STRATEGI

Strategi BBPPMD Jakarta dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan yang ditempuh Badan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan pola **Koordinasi, Informasi,**

Komunikasi dan Inovasi dijabarkan ke dalam strategi sebagai berikut :

- a. Penguatan infrastruktur kelembagaan Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- b. Penguatan kualitas sumber daya Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- c. Penguatan sistem dan metode Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya pelatihan;
- e. Peningkatan koordinasi kerjasama dengan lembaga pelatihan baik di Pusat maupun Daerah serta dengan stakeholder lainnya;
- f. Peningkatan pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi dengan pendekatan pengembangan masyarakat secara partisipatif;
- g. Pengembangan bahan-bahan standarisasi Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5. KEBIJAKAN

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut BPSDM menjalankan bagian dari arah kebijakan dan strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu :

1. **Arah Kebijakan :**

- a. Peningkatan SDM Aparatur dan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berintegritas dan berkompeten.
- b. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung Badan Pengembangan SDM

2. **Strategi :**

- Meningkatkan presentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan.
- Meningkatkan nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM

Agar Visi dan Misi pelatihan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka kebijakan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta yang dilakukan adalah : ” ***Terwujudnya pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal dan Transmigrasi yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi guna mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan*** ”.

6. **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023**

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategi organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra BBPPMD Jakarta serta Renstra BPSDM yaitu :

- a. Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023 sebanyak 330 orang;
- b. Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023 sebanyak 27 orang;
- c. Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023 sebanyak 630 orang;
- d. Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitas dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan sebanyak 8 lembaga;

- e. Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat sebesar 85,00%;
- f. Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023 sebanyak 1 Desa;
- g. Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun;
- h. Jumlah Dokumen perencanaan sebanyak 2 dokumen;
- i. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan sebanyak 28 dokumen;
- j. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMD Jakarta sebesar 90,00;
- k. Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun;
- l. Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun sebesar 75,00%;
- m. Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun;
- n. Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun;

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Triwulan merupakan turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu triwulan. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan per triwulan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaiannya.

Tabel 6
Rencana Kinerja BBPPMD Jakarta Tahun 2023

No	Program	Sasaran Strategis	Output	Target Setahun		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				T	%	T	%	T	%	T	%	T	%
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Terlaksananya pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	330	100,00	90	27,27	210	63,64	330	100,00	330	100,00
2		Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	27	100,00	0	-	0	-	27	100,00	27	100,00
3			Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023	630	100,00	0	-	0	-	300	47,62	630	100,00
4		Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan Melalui Pendampingan	Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitas dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan	8	100,00	0	-	0	-	5	62,50	8	100,00

No	Program	Sasaran Strategis	Output	Target Setahun		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				T	%	T	%	T	%	T	%	T	%
5		Terlaksananya pendampingan masyarakat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat	85%	100,00	0	-	0	-	0%	-	85%	100,00
6		Terlaksananya kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023	1	100,00	0	-	0	-	0	-	1	100,00
7		Terpenuhinya dokumen pendukung yang disusun dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun	12	100,00	3	25,00	6	50,00	9	75,00	12	100,00
8			Jumlah Dokumen perencanaan	2	100,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00	2	100,00

No	Program	Sasaran Strategis	Output	Target Setahun		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				T	%	T	%	T	%	T	%	T	%
9			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan	28	100,00	5	17,86	10	35,71	16	57,14	28	100,00
10			Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMD Jakarta	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00
11		Terwujudnya Pelayanan Publik ASN lingkup BBPPMDDTT Jakarta atas pelayanan dukungan manajemen	Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	12	100,00	3	25,00	6	50,00	9	75,00	12	100,00
12			Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	75%	100,00	10%	13,33	25%	33,33	50%	66,67	75%	100,00

No	Program	Sasaran Strategis	Output	Target Setahun		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				T	%	T	%	T	%	T	%	T	%
13			Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	12	100,00	3	25,00	6	50,00	9	75,00	12	100,00
14			Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	12	100,00	3	25,00	6	50,00	9	75,00	12	100,00

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam per triwulan tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tabel 7
Perjanjian Kinerja BBPPMD Jakarta Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	330	Orang
2	Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	1	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	27	Orang
		2	Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023	630	Orang
3	Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan Melalui Pendampingan	1	Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitas dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan	8	Lembaga

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
4	Terlaksananya Pendampingan Masyarakat Oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat	85	Persen
5	Terlaksananya Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023	1	Desa
6	Terpenuhinya Dokumen Pendukung Yang Disusun Dalam Rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun	12	Dokumen
		2	Jumlah Dokumen perencanaan	2	Dokumen
		3	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan	28	Dokumen
		4	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMD Jakarta	90,00	Persen
7	Terwujudnya Pelayanan Publik ASN Lingkup BBPPMD Jakarta Atas Pelayanan Dukungan Manajemen	1	Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	12	Bulan
		2	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	75,00	Persen
		3	Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	12	Bulan
		4	Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	12	Bulan

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rp 3.596.692.000 <i>(Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)</i>
2	Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rp 8.566.896.000 <i>(Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)</i>
	Jumlah	Rp 12.163.588.000 <i>(Dua Belas Milyar Setaus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)</i>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja yang ada dilakukan Pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja dengan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta Tahun 2023. Dengan mengacu pada indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaian, yang digunakan untuk menilai capaian indikator kinerja suatu pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditentukan, dapat diketahui tingkat keberhasilan/ kegagalan suatu pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengukuran atau evaluasi kinerja BBPPMD Jakarta dilakukan dengan cara penyesuaian rencana kegiatan dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran Kinerja Kegiatan BBPPMD Jakarta bulan Januari sampai bulan Desember 2023 dengan dasar dan realisasi kinerja dan indikator kinerja pada setiap kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran form Pengukuran Kinerja dari masing-masing program, selanjutnya Penetapan Kinerja BBPPMD Jakarta dapat dilihat pada Lampiran 1.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Naskah Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS		KINERJA	T	R	%
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Terlaksananya pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	330 orang	330 Orang	100,00
		Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	2	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	27 orang	27 orang	100,00
			3	Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023	630 orang	630 orang	100,00
		Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Melalui Pendampingan	4	Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitasi dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan	8 lembaga	8 lembaga	100,00
		Terlaksananya pendampingan masyarakat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat	85,00%	85,00%	100,00

		Terlaksananya kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	6	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023	1 Desa	1 Desa	100,00
		Terpenuhinya dokumen pendukung yang disusun dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7	Jumlah Laporan Keuangan BBPPMD Jakarta dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	100,00
			8	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	100,00
			9	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan	28 dokumen	28 dokumen	100,00
			10	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMD Jakarta	90,00	93,06	103,40
			11	Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	100,00
			12	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat	75,00%	100,00%	133,33

				diselesaikan selama 1 tahun			
			13	Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	100,00
			14	Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	100,00

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023



Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa :

- a. Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat
 - 1) Target : Memiliki target yang sama yakni sebesar 330 orang.
 - 2) Realisasi : Memiliki capaian output yang sama yakni sebesar 330 orang
 - 3) % : Memiliki capaian yang sama yakni sebesar 100,00

- b. Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat
 - 1) Target : Memiliki target yang berbeda. Tahun 2022 target sebesar 105 orang dan tahun 2023 sebesar 27 orang. Target menyesuaikan dari surat permintaan dari P2KTrans
 - 2) Realisasi : Capaian output sama-sama mencapai target pada tahun 2022 sebesar 105 orang dan tahun 2023 sebesar 27 orang.
 - 3) % : Memiliki capaian yang sama yakni sebesar 100,00

- c. Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mendapat fasilitasi pemberdayaan melalui pendampingan alumni
 - 1) Target : Tahun 2022 sebesar 85% dan pada tahun 2023 menggunakan nama IKU yang berbeda yakni Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan Masyarakat.
 - 2) Realisasi : Capaian output terealisasi sebesar 144,00%
 - 3) % : Memiliki capaian sebesar 169,00%

- d. Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023.
 - 1) Target : IKU ini baru digunakan pada tahun 2023 sebesar 630 orang (Pelatihan Bumdesa Metode Blended)
 - 2) Realisasi : Capaian output mencapai target pada tahun 2023 sebesar 630 orang.

- 3) % : Memiliki capaian sebesar 100,00
- e. Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitasi dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan
- 1) Target : Tahun 2022 belum terdapat IKU ini sedangkan Tahun 2023 memiliki target sebesar 8 lembaga
 - 2) Realisasi : Capaian output terealisasi sebesar 8 lembaga
 - 3) % : Memiliki capaian sebesar 100,00%
- f. Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat
- 1) Target : Tahun 2023 sebesar 85,00% sedangkan pada tahun 2022 menggunakan nama IKU yang berbeda yakni Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mendapat fasilitasi pemberdayaan melalui pendampingan alumni
 - 2) Realisasi : Capaian output terealisasi sebesar 85,00%
 - 3) % : Memiliki capaian sebesar 100,00%
- g. Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023
- 1) Target : Memiliki target yang berbeda, tahun 2022 sebesar 3 desa sedangkan tahun 2023 sebesar 1 desa.
 - 2) Realisasi : Capaian output sesuai dengan target yang ditetapkan. Tahun 2022 sebesar 3 desa dan tahun 2023 sebesar 1 desa
 - 3) % : Memiliki capaian yang sama yakni sebesar 100,00
- h. Jumlah Laporan Keuangan BBPPMD Jakarta dalam satu tahun
- 1) Target : Tahun 2022 memiliki target sebesar 12 dokumen. Sedangkan tahun 2023 menggunakan nama IKU yang berbeda yakni Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun.

- 2) Realisasi : Capaian output Tahun 2022 sebesar 12 dokumen
 - 3) % : Memiliki capaian yakni sebesar 100,00
- i. Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun
- 1) Target : Tahun 2023 memiliki target sebesar 12 dokumen. Sedangkan tahun 2022 menggunakan nama IKU yang berbeda yakni Jumlah Laporan Keuangan BBPPMD Jakarta dalam satu tahun.
 - 2) Realisasi : Capaian output Tahun 2022 sebesar 12 dokumen
 - 3) % : Memiliki capaian yakni sebesar 100,00
- j. Jumlah Dokumen perencanaan
- 1) Target : Memiliki target yang sama yakni sebesar 2 dokumen.
 - 2) Realisasi : Memiliki capaian output yang sama yakni sebesar 2 dokumen
 - 3) % : Memiliki capaian yang sama yakni sebesar 100,00
- k. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan
- 1) Target : Memiliki target yang berbeda Tahun 2022 yakni sebesar 17 dokumen sedangkan tahun 2023 sebesar 28 dokumen
 - 2) Realisasi : Capaian output tercapai sesuai target. Tahun 2022 yakni sebesar 17 dokumen dan tahun 2023 sebesar 28 dokumen
 - 3) % : Memiliki capaian yang sama yakni sebesar 100,00
- l. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMD Jakarta
- 1) Target : Memiliki target yang berbeda Tahun 2022 yakni nilai sebesar 76,50 sedangkan tahun 2023 nilai sebesar 90,00.
 - 2) Realisasi : Capaian output tercapai lebih dari target. Tahun 2022 yakni sebesar 96,11 dan tahun 2023 sebesar 93,06

- 3) % : Tahun 2022 memiliki nilai sebesar 125,63 lebih besar dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar 103,40. Hal ini terjadi karena target berbeda dan lebih tinggi di tahun 2023.
- m. Jumlah Laporan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun
- 1) Target : Tahun 2022 memiliki target sebesar 2 dokumen. Sedangkan tahun 2023 menggunakan nama IKU yang berbeda yakni Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun.
 - 2) Realisasi : Capaian output Tahun 2022 sebesar 2 dokumen
 - 3) % : Memiliki capaian yakni sebesar 100,00
- n. Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun
- 1) Target : Memiliki target yang sama yakni sebesar 12 bulan.
 - 2) Realisasi : Memiliki capaian output yang sama yakni sebesar 12 bulan
 - 3) % : Memiliki capaian yang sama yakni sebesar 100,00
- o. Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun
- 1) Target : Memiliki target yang sama yakni sebesar 75,00%.
 - 2) Realisasi : Memiliki capaian output yang berbeda yakni tahun 2022 sebesar 80,00% dan tahun 2023 sebesar 100,00%
 - 3) % : Memiliki capaian yang berbeda yakni tahun 2022 sebesar 107,00 dan tahun 2023 sebesar 133,00
- p. Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun
- 1) Target : Memiliki target yang sama yakni sebesar 12 bulan.
 - 2) Realisasi : Memiliki capaian output yang sama yakni sebesar 12 bulan
 - 3) % : Memiliki capaian yang sama yakni sebesar 100,00

- q. Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun
- 1) Target : Memiliki target yang sama yakni sebesar 12 bulan.
 - 2) Realisasi : Memiliki capaian output yang sama yakni sebesar 12 bulan
 - 3) % : Memiliki capaian yang sama yakni sebesar 100,00

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra BBPPMD Jakarta

Sasaran Strategis Kemendesa	Sasaran Strategis BPSDM	Sasaran Strategis BBPPMD Jakarta	Indikator Kinerja BBPPMD Jakarta		Target Renstra		Target 2023		Keterangan
1. Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berintegritas dan Berkompeten 2. Meningkatnya kualitas kapasitas SDM Perdesaan	Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berintegritas dan berkompeten	Terlaksananya pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat	210	Org	330	Org	Lebih besar

		Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	2	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat	80	Org	27	Org	Lebih kecil
			3	Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023	610	Org	630	Org	Lebih besar
			4	Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitas dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan	8	lem	8	lem	Sesuai
		Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan Melalui Pendampingan	5	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat	85,00	%	85,00	%	Sesuai

		Terlaksananya pendampingan masyarakat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	6	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan	1	desa	1	desa	Sesuai
		Terlaksananya kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	7	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun	12	bln	12	bln	Sesuai
	Terwujudnya Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bersih,	Terpenuhinya dokumen pendukung yang disusun dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	8	Jumlah Dokumen perencanaan	2	pkt	2	pkt	Sesuai

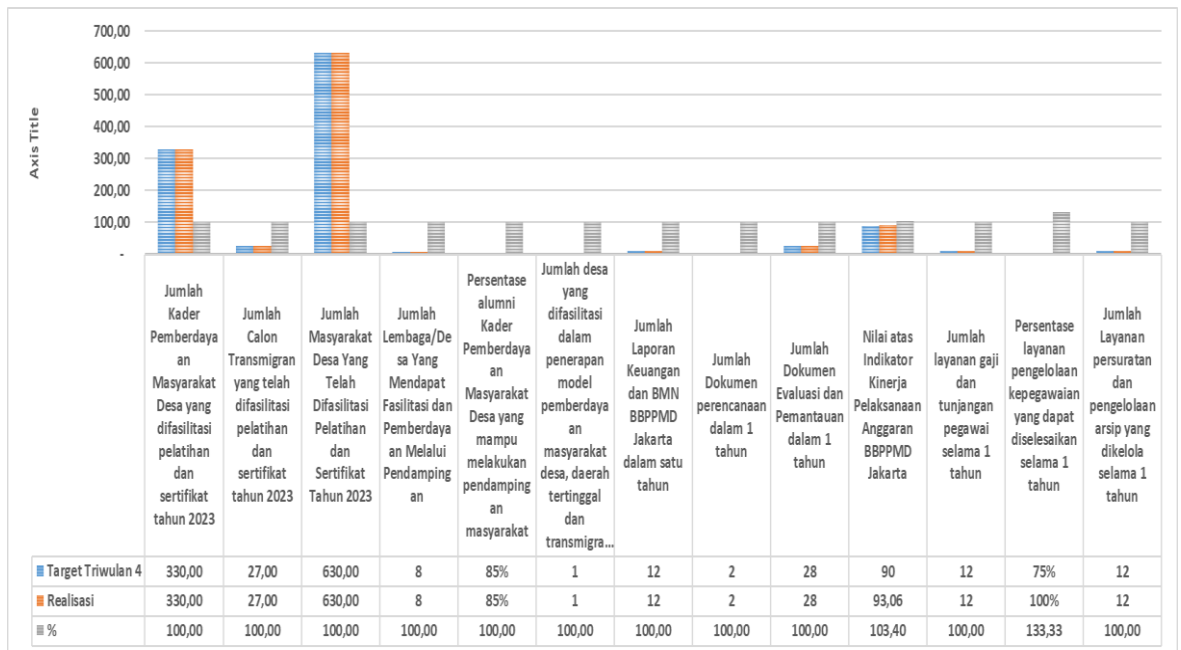
akuntabel dan berkinerja tinggi		9	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan	17	pkt	28	pkt	Tidak Sesuai
		10	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMD Jakarta	90,0 0	%	90,0 0	%	Sesuai
		11	Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	12	Bln	12	Bln	Sesuai
	Terwujudnya Pelayanan Publik ASN lingkup BBPPMDDTT Jakarta atas pelayanan dukungan manajemen	12	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	75,0 0	%	75,0 0	%	Sesuai

			13	Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	12	Bln	12	Bln	Sesuai
			14	Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	12	Bln	12	Bln	Sesuai

Dari data diatas diketahui bahwa terdapat beberapa IKU yang tidak sesuai dengan Renstra yakni :

1. Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat dikarenakan adanya sisa anggaran pelatihan sehingga target IKU Tahun 2023 pada akhir tahun disesuaikan dengan capaian atau realisasi menjadi sebesar 330 orang.
2. Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat dikarenakan adanya perubahan jumlah calon transmigran yang dilatih sehingga target IKU Tahun 2023 pada akhir tahun disesuaikan dengan capaian atau realisasi menjadi sebesar 27 orang.
3. Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023 dikarenakan adanya sisa anggaran pelatihan sehingga target IKU Tahun 2023 pada akhir tahun disesuaikan dengan capaian atau realisasi menjadi sebesar 630 orang.
4. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan dikarenakan adanya anggaran yang digunakan untuk koordinasi dalam rangka pelaporan dalam kegiatan pelaporan dan pemantauan sebanyak 11 paket sehingga target IKU Tahun 2023 menjadi sebesar 28 paket.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan, Peningkatan dan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan



a. **Indikator kinerja pertama** yakni Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023 berdasarkan kurva diatas diketahui pada Triwulan Ke- 4 dari target 330 orang (100,00%) realisasi sebesar 330 orang (100,00%).

Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Bumdesa sebanyak 30 orang (1 Angkatan) :

- 1) Pelatihan Bumdesa Kabupaten Bogor sebanyak 1 angkatan, Pelaksanaan di TC BBPPMD Ciracas pada tanggal 13 -16 Juni 2023

Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata sebanyak 300 orang (10 Angkatan) :

- 1) Angkatan 1 pada tanggal 13-18 Maret 2023 , di Agrowisata Ketan Hitam, Desa Puspamukti, Kec. Cigalontong, Kab. Tasikmalaya

- 2) Angkatan 2 pada tanggal 13-18 Maret 2023, Yayasan Darul Ma'arif, Desa Kaplongan, Kec. Karangampel Kab. Indramayu
- 3) Angkatan 3 pada tanggal 13-18 Maret 2023, Desa Jayapura, Kec. Cidaun Kab. Cianjur
- 4) Angkatan 4 pada tanggal 10 – 15 Mei 2023, Saung Purbaya Terasing Cisalada, Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- 5) Angkatan 5 pada tanggal 10 – 15 Mei 2023, Desa Jalatrang Kec. Cipaku Kab.Ciamis Prov. Jawa Barat
- 6) Angkatan 6 pada tanggal 10 – 15 Mei 2023, Aula Kantor Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- 7) Angkatan 7 pada tanggal 20 – 23 Juni 2023, Aula Kantor Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
- 8) Angkatan 8 pada tanggal 20 – 23 Juni 2023, Aula Kantor Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- 9) Angkatan 9 pada tanggal 20 – 23 Juni 2023, Aula Kantor Desa Pantok Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.
- 10) Angkatan 10 pada tanggal 12 – 15 September 2023, Aula Kantor Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan :

- 1) Revisi Automatic Adjustment TA 2023 Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor : 919/KEU.00.06/XII/2022 Tanggal 19 Desember 2022. Nilai Anggaran Yang Diblokir Revisi AA adalah sebesar Rp.2.450.928.000 yang berasal dari :

- a) 6467.DCJ.022 Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilatih secara Blended sebesar Rp.2.137.930.000 (610 orang)
 - b) 6459.EBA.994.C Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja) sebesar Rp.312.998.000 (Tunkin 13 dan 14)
- 2) Terdapat perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi dan juga validasi dari Kanwil KPPN VII terkait dengan perubahan yang terjadi.
 - 3) Terdapat perubahan lokus kegiatan pelatihan menyesuaikan dengan data dari Biro Perencanaan, sehingga perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait (Dinas PMD Kabupaten dan Desa)
 - 4) Telah dilakukan revisi dan disusun jadwal penyelenggaraan kegiatan dan rencana penarikan pada halaman 3 DIPA sesuai dengan kegiatan yang ada.

Hambatan / Kendala Penyelenggaraan Kegiatan:

- 1) Calon peserta yang kurang aktif merespon di grup whatsapp dalam melengkapi biodata peserta dan persyaratan kepesertaan.
- 2) Aplikasi Salam Desa belum dapat digunakan secara maksimal dikarenakan karena kendala sinyal internet yang kurang bagus.

Langkah Antisipatif :

- 1) Melakukan follow up peserta secara japri / whatsapp langsung ke nomer peserta, dan apabila masih sulit dihubungi meminta bantuan dari tenaga pendamping desa/DPMD Kabupaten.

- 2) Mempersiapkan alternatif lain untuk kesiapan sinyal internet (modem/hotspot)

Upaya Perbaikan :

- 1) Telah dilakukan pendataan peserta pelatihan saat pelaksanaan penjajakan / pendataan awal dilakukan sehingga meminimalisir terkait pengisian biodata peserta
- 2) Memberikan sosialisasi penggunaan aplikasi salam desa kepada peserta pelatihan sebelum kegiatan pelatihan dilakukan, sehingga pada saat pelatihan peserta telah mengenali fitur dari aplikasi salam desa.

- b. **Indikator kinerja kedua** yakni Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023. Berdasarkan kurva diatas diketahui pada Triwulan Ke- 4 dari target 27 orang (100,00%) realisasi sebesar 27 orang (100,00%).

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

- 1) Telah tersedia anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pelatihan calon transmigran sesuai dengan surat dari P2KTrans.
- 2) Telah disusun jadwal penyelenggaraan kegiatan pelatihan calon transmigran dan rencana penarikan pada halaman 3 DIPA sesuai dengan kegiatan yang ada.

Hambatan / Kendala :

Sering terjadi perubahan jumlah calon transmigran yang akan diberangkatkan sehingga akan mempengaruhi pencapaian IKU / output pelatihan calon transmigran.

Langkah Antisipatif :

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait kegiatan pelatihan calon transmigran (Dinas dan P2KTrans) terkait kepastian calon transmigran yang akan diberangkatkan.

Upaya Perbaikan :

Melakukan koordinasi lebih awal dengan pihak terkait kegiatan pelatihan calon transmigran (Dinas dan P2KTrans) terkait kepastian calon transmigran yang akan diberangkatkan.

- c. **Indikator kinerja ketiga** yakni Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023. Berdasarkan kurva diatas diketahui pada Triwulan Ke- 4 dari target 630 orang (100,00%) realisasi sebesar 630 orang (100,00%). Adapun realisasi sebesar 630 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Angkatan I, Online pada tanggal 04 -05 September 2023, Offline pada tanggal 07 – 08 September 2023. Di Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provnsi Jawa Barat.
- 2) Angkatan II, Online pada tanggal 04 -05 September 2023, Offline pada tanggal 07 – 08 September 2023. Di Aula Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.
- 3) Angkatan III, Online pada tanggal 04 -05 September 2023, Offline pada tanggal 07 – 08 September 2023. Di Kantor Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kab. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
- 4) Angkatan IV, Online pada tanggal 04 -05 September 2023, Offline pada tanggal 07 – 08 September 2023. Di Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Provnsi Jawa Barat.

- 5) Angkatan V, Online pada tanggal 04 -05 September 2023, Offline pada tanggal 07 – 08 September 2023. Di WISMA KARYA JASA KEMNAKER, Ciloto Kecamatan Cipanas Kab.Cianjur Prov.Jawa Barat.
- 6) Angkatan VI, Online pada tanggal 12 -13 September 2023, Offline pada tanggal 15 – 16 September 2023, Di Gedung Bahana, Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
- 7) Angkatan VII, Online pada tanggal 12 -13 September 2023, Offline pada tanggal 15 – 16 September 2023, Di Gedung Bahana, Desa Kiangroke, Kecamatan Bahana, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
- 8) Angkatan VIII, Online pada tanggal 12 -13 September 2023, Offline pada tanggal 15 – 16 September 2023, Di Desa Mulang Maya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung
- 9) Angkatan IX, Online pada tanggal 12 -13 September 2023, Offline pada tanggal 15 – 16 September 2023, Di Desa Sabuk Empat, Kec. Abung Kunang, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung
- 10) Angkatan X, Online pada tanggal 12 -13 September 2023, Offline pada tanggal 15 – 16 September 2023, Di Aula Desa Sitisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
- 11) Angkatan XI, Online pada tanggal 02 -03 Oktober 2023, Offline pada tanggal 05 – 06 Oktober 2023. Di Aula Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat.
- 12) Angkatan XII, Online pada tanggal 02 -03 Oktober 2023, Offline pada tanggal 05 – 06 Oktober 2023. Di Universitas Tanjung Pura, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat

- 13)** Angkatan XIII, Online pada tanggal 02 -03 Oktober 2023, Offline pada tanggal 05 – 06 Oktober 2023. Di DPMD Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
- 14)** Angkatan XIV, Online pada tanggal 05 -06 Oktober 2023, Offline pada tanggal 09 – 10 Oktober 2023. Di Aula Kantor Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta Jawa Barat
- 15)** Angkatan XV, Online pada tanggal 05 -06 Oktober 2023, Offline pada tanggal 09 – 10 Oktober 2023. Di Aula Desa Cisalak, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang Jawa Barat
- 16)** Angkatan XVI, Online pada tanggal 12 -13 Oktober 2023, Offline pada tanggal 17 – 18 Oktober 2023. Di Aula Desa Rancakalong, Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong Jawa Barat
- 17)** Angkatan XVII, Online pada tanggal 12 -13 Oktober 2023, Offline pada tanggal 17 – 18 Oktober 2023. Di Aula Desa Kertawangunan, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
- 18)** Angkatan XVIII, Online pada tanggal 12 -13 Oktober 2023, Offline pada tanggal 17 – 18 Oktober 2023. Di Aula Desa Kaplongan Lor, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
- 19)** Angkatan XIX, Online pada tanggal 16 -17 Oktober 2023, Offline pada tanggal 19 – 20 Oktober 2023. Di Aula Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat
- 20)** Angkatan XX, Online pada tanggal 16 -17 Oktober 2023, Offline pada tanggal 19 – 20 Oktober 2023. Di Aula Kantor Desa Mekarjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

- 21) Angkatan XXI, Online pada tanggal 16 -17 Oktober 2023, Offline pada tanggal 19 – 20 Oktober 2023. Di Aula Dinas PMD Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

- 1) Revisi Automatic Adjustment TA 2023 Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor : 919/KEU.00.06/XII/2022 Tanggal 19 Desember 2022. Nilai Anggaran Yang Diblokir Revisi AA adalah sebesar Rp.2.450.928.000 yang berasal dari :
 - a) 6467.DCJ.022 Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilatih secara Blended sebesar Rp.2.137.930.000 (610 orang)
 - b) 6459.EBA.994.C Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja) sebesar Rp.312.998.000 (Tunkin 13 dan 14)
- 2) Terdapat perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi dan juga validasi dari Kanwil KPPN VII terkait dengan perubahan yang terjadi.
- 3) Terdapat perubahan lokus kegiatan pelatihan menyesuaikan dengan data dari Biro Perencanaan, sehingga perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait (Dinas PMD Kabupaten dan Desa)
- 4) Telah dilakukan revisi dan disusun jadwal penyelenggaraan kegiatan dan rencana penarikan pada halaman 3 DIPA sesuai dengan kegiatan yang ada.

Hambatan / Kendala :

- 1) Revisi Buka Blokir Tahap ke - I dilakukan pada bulan Agustus yakni Pelatihan Bumdes Blended sebanyak 16

Angkatan sebesar Rp.1.580.000.000 dan masih terdapat sisa anggaran yang masih diblokir : Rp.557.930.000.

- 2) Revisi Buka Blokir Tahap ke - II dilakukan pada bulan September yakni Pelatihan Bumdes Blended sebanyak 4 Angkatan sebesar Rp.557.930.000 dan tidak terdapat sisa Anggaran Yang Masih Diblokir.
- 3) Pemblokiran dengan posisi pagu anggaran dan target output yang masih sama dan revisi DIPA yang dilaksanakan berkali-kali menyebabkan terjadinya rendahnya realisasi anggaran dan fisik BBPPMD Jakarta yang pada akhirnya mempengaruhi penilaian IKPA dan SMART menjadi kurang maksimal dalam pencapaiannya.

Langkah Antisipatif :

- 1) Melakukan koordinasi dengan BPSDM, Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan terkait dengan informasi pembukaan blokir Automatic Adjustment.
- 2) Menyusun Jadwal kegiatan pelatihan sesuai dengan kondisi yang ada.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Dinas dan Desa) terkait dengan penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan KPPN Jakarta VII terkait pengisian capaian output dengan menjelaskan kondisi anggaran terblokir sehingga realisasi menjadi tidak maksimal.

Upaya Perbaikan :

Segera melakukan revisi halaman III DIPA saat dilakukan revisi pemblokiran atau buka blokir sehingga dapat mengantisipasi dampak pemblokiran terhadap nilai IKPA.

d. **Indikator kinerja keempat** yakni Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitasi dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan. Berdasarkan kurva diatas diketahui pada Triwulan Ke- 4 dari target 8 lembaga (100,00%). Realisasi sebesar 8 lembaga (100,00%). Adapun realisasi kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Kab. Kuningan
- 2) Kab. Sukabumi
- 3) Kab. Pandeglang
- 4) Kab. Lampung Selatan
- 5) Kab. Subang
- 6) Kab. Tasikmalaya
- 7) Kab. Indramayu
- 8) Kab. Cianjur

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

- 1) Telah tersedia anggaran untuk kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan sesuai dengan perencanaan sebanyak 8 lembaga.
- 2) Telah disusun jadwal penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan pada triwulan ke II dan IV dan rencana penarikan pada halaman 3 DIPA sesuai dengan kegiatan yang ada.

Hambatan / Kendala :

- 1) Belum terdapat pedoman pendampingan yang mengukur sampai dengan ke outcome pelatihan.
- 2) Perlu ditetapkan Form Rencana Tindak Lanjut yang berjenjang (Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang) sehingga progress alumni dapat lebih terukur.

Langkah Antisipatif :

- 1) Telah disusun panduan / pedoman / SOP penyelenggaraan kegiatan pendampingan alumni oleh teman-teman PSM
- 2) Pendampingan dilakukan dengan 2 tahapan yakni : pendampingan online dan dilanjutkan dengan pendampingan offline.

Upaya Perbaikan :

Pendampingan telah dilaksanakan dengan menggunakan pedoman internal BBPPMD Jakarta dan telah mencapai target sesuai dengan IKU yang disusun.

- e. **Indikator kinerja kelima** yakni Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat. Berdasarkan kurva diatas diketahui pada Triwulan Ke- 4 dari target 85,00% (100,00%). Realisasi sebesar 85,00% (100,00%). Adapun realisasi kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Kab. Kuningan
- 2) Kab. Sukabumi
- 3) Kab. Pandeglang
- 4) Kab. Lampung Selatan
- 5) Kab. Subang
- 6) Kab. Tasikmalaya
- 7) Kab. Indramayu
- 8) Kab. Cianjur

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

- 1) Tersedianya form survey untuk mengukur besar persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat yang disusun oleh PPSDM KemendesaPDTT.

- 2) Telah disusun jadwal kegiatan survey untuk mengukur besar persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat.

Hambatan / Kendala :

Alumni pelatihan banyak yang telah keluar dari grup whatsapp setelah mengikuti pelatihan sehingga kesulitan untuk memfollow up satu persatu.

Langkah Antisipatif :

Setiap panitia/pelatih untuk menyampaikan di awal bahwa akan dilakukan kegiatan lanjutan setelah pelatihan dan menghimbau alumni tidak keluar dari grup whatsapp.

Upaya Perbaikan :

Memaksimalkan grup whatsapp pelatihan dengan mempergunakannya sebagai media untuk melaksanakan pendampingan secara berkala sehingga grup dapat lebih interaktif dan kendala/hambatan yang dialami alumni dapat dibantu pendampingan dari teman-teman pelatih.

- f. **Indikator kinerja keenam** yakni Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023. Berdasarkan kurva diatas diketahui pada Triwulan Ke- 4 dari target 1 desa (100,00%). Realisasi sebesar 1 desa (100,00%).

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

- 1) Belum tersedia anggaran untuk kegiatan penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan

transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023 sesuai dengan perencanaan sebanyak 1 desa.

- 2) Telah disusunnya SOP kegiatan penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Hambatan / Kendala :

Kegiatan penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi belum terdapat pada dokumen perencanaan / RKAKL, sehingga perlu dilakukan revisi anggaran untuk dapat mengakomodir kegiatan tersebut.

Langkah Antisipatif :

- 1) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
- 2) Melakukan revisi anggaran dari sisa kegiatan pelatihan yang telah berjalan untuk dapat digunakan dalam kegiatan penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi agar IKU dapat tercapai.
- 3) Menyusun ulang jadwal kegiatan dan melakukan revisi perencanaan penarikan halaman 3 DIPA sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan.
- 4) Menentukan lokasi penyelenggaraan penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Upaya Perbaikan :

Menyampaikan kebutuhan anggaran diawal untuk kegiatan Uji Terap Model Pendampingan sebagai salah satu tugas dan fungsi BBPPMD Jakarta pada tahun anggaran berikutnya.

g. **Indikator kinerja ketujuh** yakni Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun. Berdasarkan kurva diatas diketahui pada Triwulan Ke- 4 dari target 12 Dokumen (100,00%) telah terealisasi sebesar 12 Dokumen (100,00%). Adapun realisasi kegiatannya meliputi :

- 1) Laporan Bulan Januari
- 2) Laporan Bulan Februari
- 3) Laporan Bulan Maret
- 4) Laporan Bulan April
- 5) Laporan Bulan Mei
- 6) Laporan Bulan Juni
- 7) Laporan Bulan Juli
- 8) Laporan Bulan Agustus
- 9) Laporan Bulan September
- 10) Laporan Bulan Oktober
- 11) Laporan Bulan November
- 12) Laporan Bulan Desember

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

- 1) Tersedianya data dan informasi terkait Realisasi keuangan.
- 2) Tersedianya data dan informasi terkait Realisasi Kegiatan.
- 3) Telah disusun jadwal penyelenggaraan kegiatan dan rencana penarikan pada halaman 3 DIPA sesuai dengan kegiatan yang ada.
- 4) Tersedianya data dan informasi terkait Barang Milik Negara (BMN) BBPPMD Jakarta Tahun 2023
- 5) Tersedianya aplikasi terkait pencatatan BMN yang dilakukan secara berkala.

Hambatan / Kendala :

- 1) Terjadi selisih pada rekonsiliasi internal dengan aplikasi Simak BMN

- 2) Data rekonsiliasi tidak sama dengan data yang ada pada KPPN sehingga harus mencari selisih angkanya terlebih dahulu.
- 3) Kesulitan dalam pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI dikarenakan pemblokiran AA, sehingga kinerja BBPPMD Jakarta rendah.
- 4) Terdapat perbedaan jenis satuan pada barang persediaan untuk jenis barang yang sama, sehingga dalam menginput perlu ketelitian agar tidak terjadi salah input data BMN.

Langkah Antisipatif :

- 1) Menyusun rekap data keuangan sehingga memudahkan dalam mencocokkan data keuangan
- 2) Mendokumentasikan dokumen yang dibutuhkan sehingga mudah dalam pencarian data dan informasi yang dibutuhkan
- 3) Koordinasi dengan Bagian umum dan RPP terkait data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan.
- 4) Koordinasi dan konsultasi dengan KPPN VII dalam pengisian capaian output.
- 5) Menyusun pedoman jenis satuan barang persediaan di lingkungan internal BBPPMD Jakarta sebagai acuan dalam administrasi pertanggungjawaban.

Upaya Perbaikan :

- 1) Melakukan pencatatan secara rutin (setiap ada barang masuk atau keluar) sehingga ketidaksesuaian dapat diketahui sejak awal dan langsung dapat disesuaikan pada pencatatannya.
- 2) Telah disusun pedoman jenis satuan barang persediaan di lingkungan internal BBPPMD Jakarta sebagai acuan dalam administrasi pertanggungjawaban.

h. **Indikator kinerja kedelapan** yakni Jumlah Dokumen perencanaan dalam satu tahun. Berdasarkan kurva diatas diketahui pada Triwulan Ke- 4 dari target 2 Dokumen (100,00%) telah terealisasi sebesar 2 Dokumen (100,00%). Adapun realisasi kegiatannya adalah :

- 1) Penyusunan Program Kerja sebanyak 1 dokumen
- 2) Penyusunan RKAKL 2024 sebanyak 1 dokumen

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

- 1) Tersedianya data dan informasi terkait penyusunan program kerja tahun 2023.
- 2) Telah disusun jadwal penyelenggaraan kegiatan dan rencana penarikan pada halaman 3 DIPA sesuai dengan kegiatan yang ada.

Hambatan / Kendala :

- 1) Revisi anggaran mempengaruhi juga perubahan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) Kepala BBPPMD Jakarta.
- 2) Adanya ketidaksesuaian jadwal kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan sehingga perlu jadwal perlu disusun ulang.

Langkah Antisipatif :

- 1) Mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sehingga mudah dalam pencarian data dan informasi yang dibutuhkan
- 2) Koordinasi dengan bagian umum dan RPP terkait data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan program kerja tahun 2023.

Upaya Perbaikan :

- 1) Melakukan perbaikan IKU dan PK setiap semester (Bulan Juli dan Desember) sesuai dengan kondisi yang ada.
- 2) Melakukan penyesuaian jadwal atau revisi Halaman III DIPA sesuai dengan kebutuhan masing-masing kasubbag sehingga dalam pelaksanaannya dapat komitmen dengan jadwal yang telah disusun.

i. **Indikator kinerja kesembilan** yakni Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan selama satu tahun. Berdasarkan kurva diatas diketahui pada Triwulan Ke- 4 dari target 28 Dokumen (100,00%) telah terealisasi sebesar 28 Dokumen (100,00%). Adapun realisasi kegiatannya adalah :

- 1) Penyusunan Laporan Tahunan 2022
- 2) Penyusunan Laporan Bulan Januari
- 3) Penyusunan Laporan Bulan Februari
- 4) Penyusunan Laporan Bulan Maret
- 5) Penyusunan Laporan Bulan April
- 6) Penyusunan Laporan Bulan Mei
- 7) Penyusunan Laporan Bulan Juni
- 8) Penyusunan Laporan Bulan Juli
- 9) Penyusunan Laporan Bulan Agustus
- 10) Penyusunan Laporan Bulan September
- 11) Penyusunan Laporan Bulan Oktober
- 12) Penyusunan Laporan Bulan November
- 13) Penyusunan Laporan Bulan Desember
- 14) Laporan Kinerja Triwulan I
- 15) Laporan Kinerja Triwulan II
- 16) Laporan Kinerja Triwulan III
- 17) Laporan Kinerja Triwulan IV
- 18) Koordinasi Terkait Laporan Bulan Februari
- 19) Koordinasi Terkait Laporan Bulan Maret
- 20) Koordinasi Terkait Laporan Bulan April

- 21) Koordinasi Terkait Laporan Bulan Mei
- 22) Koordinasi Terkait Laporan Bulan Juni
- 23) Koordinasi Terkait Laporan Bulan Juli
- 24) Koordinasi Terkait Laporan Bulan Agustus
- 25) Koordinasi Terkait Laporan Bulan September
- 26) Koordinasi Terkait Laporan Bulan Oktober
- 27) Koordinasi Terkait Laporan Bulan November
- 28) Koordinasi Terkait Kegiatan Branchmarking

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

- 1) Tersedianya data dan informasi terkait penyusunan laporan evaluasi dan pemantauan.
- 2) Telah disusun jadwal penyelenggaraan kegiatan dan rencana penarikan pada halaman 3DIPA sesuai dengan kegiatan yang ada.

Hambatan / Kendala :

- 1) Penginputan realisasi anggaran di aplikasi SAKTI tampilannya tidak utuh yakni header tidak terlihat sehingga terjadi salah penginputan realisasi pada detail kegiatan dan mengakibatkan terjadi perbedaan pencatatan sisa anggaran per detail kegiatan.
- 2) Dikarenakan penginputan realisasi sekarang dilakukan per detail kegiatan (bukan per akun kegiatan) sehingga apabila anggaran pada detail kegiatan tidak mencukupi harus dilakukan revisi anggaran terlebih dahulu agar dana tersedia sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Terjadinya revisi anggaran yang dilakukan beberapa kali sehingga menyebabkan terjadinya perubahan perencanaan penarikan dana bulanan sehingga terjadi deviasi yang cukup tinggi antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Langkah Antisipatif :

- 1) Melakukan cek realisasi terlebih dahulu sebelum melakukan input realisasi kegiatan agar tidak terjadi pagu minus.
- 2) Melakukan penyisiran anggaran dan melakukan revisi sesuai dengan kebutuhan yang ada, agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan realisasi dapat mencapai target yang diharapkan.
- 3) Melakukan revisi RDP Halaman III DIPA sesuai dengan hasil revisi anggaran yang dilakukan untuk mencegah tingginya deviasi antara perencanaan anggaran dan realisasi anggaran yang akan mengakibatkan nilai EKA dan IKPA menjadi rendah.

Upaya Perbaikan :

- 1) Telah dilakukan cek realisasi sebelum melakukan revisi anggaran sehingga tidak terjadi pagu minus pada kegiatan.
- 2) Telah dilakukan revisi RDP Halaman III DIPA sesuai dengan hasil revisi anggaran yang dilakukan untuk mencegah tingginya deviasi antara perencanaan anggaran dan realisasi anggaran yang akan mengakibatkan nilai EKA dan IKPA menjadi rendah.

- j. **Indikator kinerja kesepuluh** yakni Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMD Jakarta. Pada triwulan ke 4 target sebesar 90,00 (100,00%) dan mencapai nilai lebih besar dari target yakni sebesar 93,06 (133,33%).

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III
- 3) Penyerapan Anggaran
- 4) Belanja Kontraktual
- 5) Penyelesaian Tagihan
- 6) UP dan TUP

- 7) Dispensasi
- 8) Capaian Output

Hambatan / Kendala :

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan :

- 1) Revisi Automatic Adjustment TA 2023 Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor : 919/KEU.00.06/XII/2022 Tanggal 19 Desember 2022. Nilai Anggaran Yang Diblokir Revisi AA adalah sebesar Rp.2.450.928.000 yang berasal dari :
 - a) 6467.DCJ.022 Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilatih secara Blended sebesar Rp.2.137.930.000 (610 orang)
 - b) 6459.EBA.994.C Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja) sebesar Rp.312.998.000 (Tunkin 13 dan 14)
- 2) Terdapat perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi dan juga validasi dari Kanwil KPPN VII terkait dengan perubahan yang terjadi.
- 3) Telah dilakukan revisi dan disusun jadwal penyelenggaraan kegiatan dan rencana penarikan pada halaman 3 DIPA sesuai dengan kegiatan yang ada.
- 4) Pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dikarenakan terjadi banyak revisi sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang telah disusun sehingga terjadi deviasi pada realisasi dan mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi lambat.
- 5) Dikarenakan revisi Automatic Adjustment hanya dilakukan pemblokiran (besar pagu tetap) dan jumlah output tidak berubah mengakibatkan nilai kinerja menjadi rendah.

Langkah Antisipatif :

- 1) Melakukan rapat pengendalian bersama subbag umum dan subbag RPP untuk membahas terkait realisasi anggaran dan kegiatan sehingga dapat dilakukan perbaikan pada kegiatan selanjutnya.
- 2) Melakukan revisi anggaran bersamaan dengan revisi halaman 3 DIPA agar jumlah revisi tidak terlalu banyak dilakukan dan mempengaruhi nilai IKPA.
- 3) Koordinasi dan konsultasi dengan KPPN VII dalam pengisian capaian output.

Upaya Perbaikan :

Telah dilakukan revisi RDP Halaman III DIPA sesuai dengan hasil revisi anggaran yang dilakukan untuk mencegah tingginya deviasi antara perencanaan anggaran dan realisasi anggaran yang akan mengakibatkan nilai IKPA menjadi rendah.

- k. **Indikator kinerja kesebelas** yakni Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama satu tahun. Berdasarkan kurva diatas diketahui pada Triwulan Ke- 4 dari target 12 bulan (100,00%) telah terealisasi sebesar 12 bulan (100,00%).

Adapun realisasi kegiatannya adalah :

- 1) Gaji dan Tunjangan Bulan Januari
- 2) Gaji dan Tunjangan Bulan Februari
- 3) Gaji dan Tunjangan Bulan Maret
- 4) Gaji dan Tunjangan Bulan April
- 5) Gaji dan Tunjangan Bulan Mei
- 6) Gaji dan Tunjangan Bulan Juni
- 7) Gaji dan Tunjangan Bulan Juli
- 8) Gaji dan Tunjangan Bulan Agustus
- 9) Gaji dan Tunjangan Bulan September
- 10) Gaji dan Tunjangan Bulan Oktober
- 11) Gaji dan Tunjangan Bulan November

12) Gaji dan Tunjangan Bulan Desember

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

- 1) Tersedianya data dan informasi terkait pengajuan gaji dan tunjangan
- 2) Tersedianya aplikasi pengajuan gaji dan tunjangan

Hambatan / Kendala :

Pengajuan tunjangan kinerja pegawai seringkali mengalami keterlambatan dikarenakan laporan kinerja pegawai yang tidak tepat waktu (melebihi tanggal 5 setiap bulannya).

Langkah Antisipatif :

Membuat google form untuk pengisian kinerja harian pegawai agar pada saat akhir bulan sudah dapat dikompilasi oleh masing-masing pegawai menjadi laporan kinerja bulanan.

Upaya Perbaikan :

Telah terkumpulnya laporan kinerja harian pegawai yang disampaikan secara tepat waktu oleh bagian kepegawaian kepada Kepegawaian BPSDM.

- I. **Indikator kinerja kedubelas** yakni Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun. Berdasarkan kurva diatas diketahui pada Triwulan Ke- 4 dari target 75,00% (100,00%) telah terealisasi sebesar 100,00% (133,33%). Adapun realisasi kegiatannya adalah :
 - 1) layanan pengelolaan kepegawaian bulan januari
 - 2) layanan pengelolaan kepegawaian bulan februari
 - 3) layanan pengelolaan kepegawaian bulan maret
 - 4) layanan pengelolaan kepegawaian bulan april
 - 5) layanan pengelolaan kepegawaian bulan mei
 - 6) layanan pengelolaan kepegawaian bulan juni

- 7) layanan pengelolaan kepegawaian bulan juli
- 8) layanan pengelolaan kepegawaian bulan agustus
- 9) layanan pengelolaan kepegawaian bulan september
- 10) layanan pengelolaan kepegawaian bulan oktober
- 11) layanan pengelolaan kepegawaian bulan november
- 12) layanan pengelolaan kepegawaian bulan desember

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

- 1) Tersedianya data dan informasi terkait pengisian data kepegawaian pada dosir masing-masing pegawai.
- 2) Tersedianya aplikasi terkait kepegawaian yang mudah untuk diakses oleh masing-masing pegawai.

Hambatan / Kendala :

- 1) Keterlambatan dalam pengisian data terkait kepegawaian oleh masing-masing pegawai, dikarenakan kurang aktifnya pegawai dan kurangnya kontrol dari bagian kepegawaian untuk pegawai yang belum mengisi data tersebut.
- 2) Laporan Kinerja pegawai seringkali mengalami keterlambatan (melebihi tanggal 5 setiap bulannya) sehingga mengakibatkan keterlambatan untuk tunjangan kinerja pegawai.

Langkah Antisipatif :

- 1) Membuat rekapitulasi pegawai yang telah melengkapi data terkait kepegawaian dan menginformasikannya di grup / kontak langsung ke pegawai yang belum melakukan pengisian.
- 2) Mengupdate google form untuk pengisian kinerja harian pegawai yang dapat langsung dicetak sesuai form laporan Kinerja Pegawai sehingga pada saat akhir bulan sudah dapat dilaporkan masing-masing pegawai tepat waktu.

Upaya Perbaikan :

Telah terkumpulnya laporan kinerja harian pegawai yang disampaikan secara tepat waktu oleh bagian kepegawaian kepada Kepegawaian BPSDM.

m. **Indikator kinerja ketigabelas** yakni Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun. Berdasarkan kurva diatas diketahui pada Triwulan Ke- 4 dari target 12 bulan layanan (100,00%) telah terealisasi sebesar 12 bulan layanan (100,00%). Adapun realisasi kegiatannya adalah:

- 1) Layanan persuratan dan pengelolaan arsip bulan januari
- 2) Layanan persuratan dan pengelolaan arsip bulan februari
- 3) Layanan persuratan dan pengelolaan arsip bulan maret
- 4) Layanan persuratan dan pengelolaan arsip bulan april
- 5) Layanan persuratan dan pengelolaan arsip bulan mei
- 6) Layanan persuratan dan pengelolaan arsip bulan juni
- 7) Layanan persuratan dan pengelolaan arsip bulan juli
- 8) Layanan persuratan dan pengelolaan arsip bulan agustus
- 9) Layanan persuratan dan pengelolaan arsip bulan september
- 10) Layanan persuratan dan pengelolaan arsip bulan oktober
- 11) Layanan persuratan dan pengelolaan arsip bulan november
- 12) Layanan persuratan dan pengelolaan arsip bulan desember

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

- 1) Tersedianya buku catatan surat keluar dan surat masuk.
- 2) Tersedianya ruang arsip BBPPMD Jakarta.
- 3) Telah tersedia aplikasi Srikandi untuk pengelolaan administrasi persuratan.

Hambatan / Kendala :

- 1) Pengelolaan arsip surat tugas kurang terdokumentasi dengan baik. Surat tugas yang telah final tidak sesuai dengan surat tugas yang diarsipkan / dicatat di buku surat tugas oleh bagian kepegawaian.
- 2) Pengelolaan arsip kepegawaian kurang terdokumentasi dengan baik sehingga terjadi kehilangan arsip terkait kepegawaian hal ini terjadi pada Laporan Kinerja Bulanan Pegawai.
- 3) Belum terlalu memahami penggunaan aplikasi Srikandi untuk pengelolaan persuratan.

Langkah Antisipatif :

- 1) Melakukan penataan arsip surat tugas secara lebih detail dan teliti dengan cara updating data arsip persuratan minimal 1 bulan sekali.
- 2) Melakukan penataan arsip kepegawaian secara lebih detail dan teliti dengan cara updating data arsip kepegawaian minimal 1 bulan sekali.
- 3) Dilakukan sosialisasi aplikasi Srikandi

Upaya Perbaikan :

Telah dibentuk tim pengarsipan yang mengelola persuratan dan arsip BBPPMD Jakarta dan dalam pencatatannya telah mulai menggunakan aplikasi srikandi.

- n. **Indikator kinerja keempatbelas** yakni Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun. Berdasarkan kurva diatas diketahui pada Triwulan Ke- 4 dari target 12 bulan layanan (100,00%) telah terealisasi sebesar 12 bulan layanan (100,00%). Adapun realisasi kegiatannya adalah:

- 1) Layanan operasional dan pemeliharaan bulan januari
- 2) Layanan operasional dan pemeliharaan bulan februari
- 3) Layanan operasional dan pemeliharaan bulan maret
- 4) Layanan operasional dan pemeliharaan bulan april
- 5) Layanan operasional dan pemeliharaan bulan mei
- 6) Layanan operasional dan pemeliharaan bulan juni
- 7) Layanan operasional dan pemeliharaan bulan juli
- 8) Layanan operasional dan pemeliharaan bulan agustus
- 9) Layanan operasional dan pemeliharaan bulan september
- 10)Layanan operasional dan pemeliharaan bulan oktober
- 11)Layanan operasional dan pemeliharaan bulan november
- 12)Layanan operasional dan pemeliharaan bulan desember

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

- 1) Tersedianya data sarana dan prasarana BBPPMD Jakarta sebagai dasar untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana BBPPMD Jakarta
- 2) Telah disusunnya jadwal pelaksanaan kegiatan untuk layanan operasional dan pemeliharaan BBPPMD Jakarta
- 3) Tersedianya SDM yang memadai dalam mengelola sarana dan prasarana BBPPMD Jakarta.

Hambatan / Kendala :

- 1) Kurangnya kontrol dari bagian umum terkait kebutuhan operasional sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas dan fungsi BBPPMD Jakarta
- 2) Kurangnya kontrol dari bagian umum terkait kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas dan fungsi BBPPMD Jakarta

Langkah Antisipatif :

- 1) Melakukan identifikasi kebutuhan operasional sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas dan fungsi BBPPMD Jakarta
- 2) Melakukan identifikasi kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas dan fungsi BBPPMD Jakarta.

Upaya Perbaikan :

Melakukan identifikasi kebutuhan operasional serta kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana BBPPMD Jakarta sebagai dasar dalam penyusunan BMN dan SBSK.

B. KINERJA ANGGARAN

1) Analis Kinerja Anggaran

**Perbandingan Penyerapan Anggaran BBPPMD Jakarta
Triwulan Ke- 4 Tahun 2023 (Pagu Keseluruhan)**



Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa :

- a) Pencapaian kinerja anggaran Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta pada Tahun 2023 cukup baik yakni sebesar 98,00%. Realisasi paling besar yakni pada kegiatan pelatihan bumdesa metode blended sebesar 99,94%.
- b) Dari seluruh IKU yang disusun dengan anggaran yang ada terlihat bahwa BBPPMD Jakarta rata-rata telah dapat mencapai target IKUnya sebesar 100,00%.

2) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Revisi / Tgl	Rincian	Output	Pagu
Pagu Awal (30 November 2022)	<p><i>Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi (Rp.4.000.000.000.-)</i></p> <p>a. Pelatihan Calon Transmigrasi Yang Dilatih : 80 orang</p> <p>b. Pelatihan Bumdesa Metode Blended : 610 orang</p> <p>c. Pelatihan Bumdesa di Balai : 30 orang</p> <p>d. Pelatihan Desa Wisata : 180 orang</p> <p>e. Pengembangan Pemberdayaan Masdes : 8 Lembaga</p> <p><i>Program Dukungan Manajemen (Rp.8.862.501.000.-)</i></p> <p>a. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal : 3 Layanan</p>	900 orang	Rp.12.862.501.000.-

	<ul style="list-style-type: none"> b. Layanan Umum : 1 Layanan c. Layanan Perkantoran : 1 Layanan d. Layanan Manajemen SDM : 1 Layanan e. Layanan Perencanaan dan Penganggaran : 2 Dokumen f. Layanan Pemantauan dan Evaluasi : 28 Dokumen 		
Revisi ke I DIPA ke-1 (27 Desember 2022)	<p>Revisi Automatic Adjustment TA 2023 Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor : 919/KEU.00.06/XII/2022 Tanggal 19 Desember 2022.</p> <p>Nilai Anggaran Yang Diblokir Revisi AA adalah sebesar Rp.2.450.928.000 yang berasal dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 6467.DCJ.022 Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilatih secara Blended sebesar Rp.2.137.930.000 (610 orang) b. 6459.EBA.994.C Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja) sebesar Rp.312.998.000 (Tunkin 13 dan 14) 	900 orang	<p>Pagu RKAKL Rp.12.862.501.000.-</p> <p>Pagu Setelah diblokir: Rp.10.411.574.000,-</p>
Revisi ke II DIPA ke-2 (15 Februari 2023)	<p>Revisi Halaman III DIPA Triwulan 1 dan Revisi Kegiatan Penunjang Sosial Media (dengan jumlah pagu sama)</p>	900 orang	<p>Pagu RKAKL Rp.12.862.501.000.-</p>

			Pagu Setelah diblokir: Rp.10.411.574.000,-
Revisi ke III DIPA ke-3 (10 April 2023)	Pemuktahiran Halaman III DIPA Triwulan 1 dan Penghapusan Sewa Kendaraan menjadi Pengelolaan Arsip, Perjalanan Pimpinan, Koordinasi Lintas Sektor, Tambahan Jamuan Tamu dan Pimpinan (dengan jumlah pagu sama)	900 orang	Pagu RKAKL Rp.12.862.501.000,- Pagu Setelah diblokir: Rp.10.411.574.000,-
Revisi ke IV DIPA ke-4 (20 Mei 2023)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Kebutuhan Belanja Modal dari Belanja Barang Operasional (002) sebesar Rp.128.580.000 yang rinciannya adalah sbb : <ol style="list-style-type: none"> a. Penangkal Petir 1 pkt b. Pengadaan Scanner 1 pkt c. Pengadaan Filling Cabinet 2 pkt d. Pengadaan Rak Besi Siku 8 pkt 2. Revisi Pelatihan Calon Transmigran , pelatihan bumdesa pelaksanaan di balai dan Pelatihan Bumdesa Blended sebesar Rp.495.195.000 menjadi: <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi penyelenggaraan pelatihan semula 7 pkt menjadi 11 paket bertambah sebesar Rp.90.534.000 b. Pelatihan desa wisata semula 180 orang 	968 orang	Pagu RKAKL Rp.12.862.501.000,- Pagu Setelah diblokir: Rp.10.411.574.000,-

	menjadi 300 orang bertambah sebesar Rp.404.661.000		
Revisi ke V DIPA ke-5 (18 Juli 2023)	Revisi penghapusan blokir belanja pegawai (tunjangan kinerja) sebesar Rp.312.998.000 Sisa Anggaran Yang Masih Diblokir : Rp. 2.137.930.000	968 orang	Pagu RKAKL Rp.12.549.503.000.- Pagu Setelah diblokir: Rp.10.411.573.000,-
Revisi ke VI DIPA ke-6 (15 Agustus 2023)	Revisi Buka Blokir AA Pelatihan Bumdes Blended sebanyak 16 Angkatan sebesar Rp.1.580.000.000 Sisa Anggaran Yang Masih Diblokir : Rp.557.930.000	968 orang	Pagu RKAKL Rp.12.549.503.000.- Pagu Setelah diblokir: Rp.11.991.573.000,-
Revisi ke VII DIPA ke-7 (25 Agustus 2023)	Revisi Pemuktahiran POK (sisa Pelatihan dan sewa kendaraan operasional) Sisa Anggaran Yang Masih Diblokir : Rp.557.930.000	968 orang	Pagu RKAKL Rp.12.549.503.000.- Pagu Setelah diblokir: Rp.11.991.573.000,-
Revisi ke VIII DIPA Ke-8 (5 September 2023)	Revisi Buka Blokir AA Tahap II Pelatihan Bumdes Blended sebanyak 4 Angkatan sebesar Rp.557.930.000 Sisa Anggaran Yang Masih Diblokir : Rp.0	968 orang	Pagu RKAKL Rp.12.549.503.000.-

Revisi ke IX DIPA Ke-9 (11 Oktober 2023)	Revisi Halaman III DIPA dan Melakukan revisi pada sisa kegiatan pelatihan menjadi kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Masyarakat Desa.	968 orang	Pagu RKAKL Rp.12.549.503.000.-
Revisi ke-X DIPA Ke-10 (2 November 2023)	Revisi terdiri dari : 1. Perpindahan Anggaran teknis ke Anggaran Dukungan Manajemen sebesar Rp. 403.308.000 yang digunakan untuk : a. Belanja Modal : Rp.374.508.000 b. Belanja Op Perkantoran : Rp.28.800.000 2. Pengurangan Belanja Pegawai sebesar Rp.466.123.000 yang digunakan : a. Memenuhi belanja pegawai pada satker dibawah BPSDM sebesar Rp.385.915.000 Memenuhi kebutuhan belanja modal pengadaan AC BBPPMD Jakarta sebanyak 10 unit sebesar Rp.80.208.000	987 orang	Pagu RKAKL Rp.12.163.588.000.-
Revisi Ke-XI POK Ke-1 (1 Desember 2023)	Revisi POK ke-1 terdiri dari : 1. Revisi Sisa Anggaran Kegiatan Pelatihan Menjadi : FGD Pendampingan	987 orang	Pagu RKAKL Rp.12.163.588.000.-

	<p>Masyarakat dan Benchmarking</p> <p>2. Revisi sisa anggaran kegiatan Webinar Lentera, Uji Terap Pelatihan Masyarakat menjadi peningkatan kapasitas PSM</p> <p>3. Honor Kegiatan ZI direvisi menjadi Backdrop</p> <p>4. Revisi sisa anggaran operasional perkantoran menjadi pembelian baju kerja PSM dan Petugas Kebersihan Beserta Peralatan Kerja Petugas keamanan dan kebersihan</p> <p>5. Revisi penyesuaian anggaran pengadaan / belanja modal sesuai dengan kebutuhan</p>		
Revisi Ke-XII DIPA Ke-11 (5 Desember 2023)	Revisi Halaman III DIPA dan Pemuktahiran POK	987 orang	Pagu RKAKL Rp.12.163.588.000.-
Revisi Ke-XIII DIPA Ke-12 (5 Desember 2023)	<p>Revisi Optimalisasi Anggaran :</p> <p>1. Kegiatan ZI untuk backdrop direvisi menjadi perjalanan dinas terkait ZI</p> <p>2. Revisi Belanja Pegawai terkait Gaji Minus</p> <p>3. Revisi Belanja Pegawai Terkait Uang Lembur menyesuaikan dengan hitungan ril</p> <p>4. Revisi Sisa Operasional Perkantoran menjadi pemeliharaan gedung</p>	987 orang	Pagu RKAKL Rp.12.163.588.000.-

	sesuai dengan RKBMN dan Sewa Kendaraan Pimpinan dan Operasional serta perjalanan dinas pimpinan dan koordinasi lintas sektor. 5. Revisi anggaran sisa pelatihan untuk kegiatan benchmarking		
Revisi Ke-XIV POK Ke-2 (28 Desember 2023)	Revisi belanja pegawai uang lembur disesuaikan dengan pengeluaran rill.	987 orang	Pagu RKAKL Rp.12.163.588.000.-

Dari data diatas diketahui bahwa dari anggaran awal BBPPMD Jakarta adalah sebesar Rp.12.862.501.000.- dengan target sebesar 900 orang dan selama tahun 2023 terdapat revisi pengurangan pada belanja pegawai dengan total Rp. 798.913.000 (efisiensi anggaran sebesar 6,21%) sehingga pagu BBPPMD Jakarta pada Revisi Ke XIV (28 Desember 2023) turun menjadi sebesar Rp.12.163.588.000 dengan target 987 orang.

Dapat diambil kesimpulan bahwa BBPPMD Jakarta telah terdapat efisiensi sebesar Rp. 798.913.000 (efisiensi anggaran sebesar 6,21%) namun ada kenaikan output sebanyak 87 orang.

C. SARAN

Secara garis besar program dan kegiatan laporan Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023 Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi sudah cukup baik, dan hampir seluruh kegiatan pelaksanaan telah sesuai dengan jadwal yang telah disusun, kecuali untuk kegiatan yang terkena Automatic Adjustment tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan diawal sampai

pembukaan pemblokiran dilakukan. Diharapkan agar BBPPMD Jakarta dapat membuat dan menyesuaikan jadwal perencanaan kegiatan yang baru dan lebih baik lagi pada tahun yang akan datang sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. UKURAN KINERJA

Kinerja yang telah dicapai Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 dapat dikatakan cukup baik, hal ini didasarkan pada pencapaian realisasi keuangan mencapai sebesar Rp.11.920.364.778,- atau 98,00% sedangkan untuk fisik kegiatan sebesar 100,00 % dari anggaran yang dikelola sebesar Rp.12.163.588.000, . Adapun anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp.243.223.222,- atau 2,00%.

B. KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, namun terjadi deviasi antara target dan realisasi pada capaian kinerja Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta sampai dengan Triwulan Ke- 4 dikarenakan :

- 1) Revisi Automatic Adjustment TA 2023 Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor : 919/KEU.00.06/XII/2022 Tanggal 19 Desember 2022. Nilai Anggaran Yang Diblokir Revisi AA adalah sebesar Rp.2.450.928.000 yang berasal dari :
 - a) 6467.DCJ.022 Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilatih secara Blended sebesar Rp.2.137.930.000 (610 orang)
 - b) 6459.EBA.994.C Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja) sebesar Rp.312.998.000 (Tunkin 13 dan 14)
- 2) Terdapat perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi dan juga validasi dari Kanwil KPPN VII terkait dengan perubahan yang terjadi.

- 3) Terdapat perubahan lokus kegiatan pelatihan menyesuaikan dengan data dari Biro Perencanaan, sehingga perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait (Dinas PMD Kabupaten dan Desa)
- 4) Antara realisasi dan perencanaan tidak sesuai dalam pelaksanaannya.
- 5) Dikarenakan revisi Automatic Adjustment hanya dilakukan pemblokiran (besar pagu tetap) dan jumlah output tidak berubah mengakibatkan nilai NKA dan IKPA menjadi kurang optimal.

C. REKOMENDASI

Mengatasi permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan kegiatan sebaiknya :

1. Melakukan Penyisiran Anggaran untuk sisa kegiatan yang telah berjalan, sehingga dapat memenuhi / menambah output kegiatan dan memprediksikan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun serta melakukan penyesuaian pada Rencana Penarikan Dana (RDP) Halaman III DIPA agar tidak terjadi deviasi yang akan mempengaruhi nilai NKA dan IKPA BBPPMD Jakarta.
2. Melakukan rapat pengendalian internal untuk merencanakan, menjadwalkan dan memantau realisasi kegiatan yang telah berjalan agar dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan kegiatan berikutnya, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3. Perlunya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan, sehingga memudahkan dalam penyelenggaraan kegiatan.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, hal ini akan menjadi perhatian kami pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya pada kegiatan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta.

**Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Jakarta**

IKU TAHUN 2023

BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI JAKARTA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN IKU	TARGET	PIC	ANGGARAN (RP.)	KEGIATAN
	TEKNIS							
1	Terlaksananya pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	<p>Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah masyarakat desa yang telah difasilitasi pelatihan KPMD, BUMDes/ BUMDesma, MHA, Pembangunan partisipatif, Desa wisata, dan pelatihan lain sebagai amanat UU Desa oleh UPT BB/BLM di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Pengelolaan Bumdesa Balai 30 orang 2. Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata 300 orang 3. Koordinasi Pelatihan 11 Paket 	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	330 orang	Subbag RPP dan PSM BBPPMD Jakarta	1.578.059.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Pengelolaan Bumdesa Balai 30 orang 2. Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata 300 orang 3. Koordinasi Pelatihan 11 Paket
2	Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	<p>Calon Transmigran Yang dilatih adalah setiap warga Negara RI yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk mengikuti program transmigrasi, yang setelah diseleksi, dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi peserta program transmigrasi dan akan ditempatkan di lokasi transmigrasi</p> <p>Pelatihan Calon transmigran 27 orang</p>	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	27 orang	Subbag RPP dan PSM BBPPMD Jakarta	119.502.000	Pelatihan Catrans di Balai (27 orang)
		Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023		Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023	630 orang	Subbag RPP dan PSM BBPPMD Jakarta	1.582.763.000	Pelatihan Bumdesa (Blended) 630 orang
3	Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Melalui Pendampingan	Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitasi dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan	Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja alumni setelah pelatihan berdasarkan Rencana Tindak Lanjut Pelatihan Yang Telah Disusun setelah pelatihan.	Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitasi dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan	8 Lembaga	PSM BBPPMD Jakarta	271.813.000	Pendampingan Alumni Pelatihan Masyarakat 8 pkt
4	Terlaksananya pendampingan masyarakat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat	Pendampingan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh alumni pelatihan setelah pelatihan kepada masyarakat sebagai penerapan hasil pelatihan.	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat	85,00 Persen	PSM BBPPMD Jakarta		Menyebarkan instrumen PPSDM

5	Terlaksananya kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023	Uji Terap Model Pendampingan dan Pemberdayaan : adalah uji terap yang dilakukan sesuai dengan Model pendampingan dan pemberdayaan yang dirancang oleh P3MD	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023	1 Desa	PSM BBPPMD Jakarta	44.555.000	Uji Terap Model Pendampingan dan Pemberdayaan
	MANAJEMEN							
1	Terpenuhinya dokumen pendukung yang disusun dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun	laporan keuangan terdiri dari : 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Evaluasi Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi APIP	12 dokumen	Kasubbag Umum		Kegiatan yang diakomodir: Laporan Keuangan dan BMN (Triwulanan, Semesteran dan Tahunan)
		Jumlah Dokumen perencanaan	Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian kinerja. Rincian nilai per komponen adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (25%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Internal (10%) 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BBPPMD Jakarta dari APIP	2 Dokumen	Kasubbag RPP	10.300.000	1. Penyusunan Program kerja 2. Penyusunan RKAKL
		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan	Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian kinerja. Rincian nilai per komponen adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (25%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Internal (10%) 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BBPPMD Jakarta dari APIP	28 Dokumen	Kasubbag RPP	45.300.000	1. Penyusunan Laporan tahunan 2021 2. Penyusunan Laporan kinerja 3. Penyusunan Laporan bulanan 4. Koordinasi dalam rangka pelaporan dan persuratan
		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMD Jakarta	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. IKPA meliputi 12 indikator yakni: (a) Pengelolaan UP (10%), (b) Data Kontrak (10%), (c) Kesalahan SPM (5%), (d) Retur SP2D (5%), (e) Halaman III DIPA (5%), (f) Revisi DIPA (5%), (g) Penyelesaian Tagihan(20%), (h) Rekon LPJ (5%), (i) Renkas (5%), (j) Realisasi (20%), (k) Pagu Minus (5%), (l) Dispensasi SPM (5%)	Nilai hasil evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat	90.00 Persen	Kasubbag Umum		Pembuatan Laporan dan Pemeriksaan Internal

2	Terwujudnya Pelayanan Publik ASN lingkup BBPPMDDTT Jakarta atas pelayanan dukungan manajemen	Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	Jumlah layanan gaji dan tunjangan : 12 bulan layanan terdiri dari pengajuan gaji dan tunjangan sampai dengan pencairan gaji dan tunjangan	Jumlah layanan gaji dan tunjangan yang diberikan dalam 1 tahun	12 bulan	Kasubbag Umum	4.091.532.000	Pembayaran Gaji dan tunjangan	
		Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	<p>Pengelolaan Kepegawaian yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Karpeg, Karis, Karsu, Taspen dan Askes / BPJS 2. Pengajuan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) 3. Pengajuan Surat Cuti 4. Pengajuan Usulan mengikuti diklat 5. Pengajuan pensiun PNS 6. Pengajuan ljin melanjutkan pendidikan 7. Pengajuan ljin Pindah Tempat Kerja 8. Pengajuan Penyesuaian ljasah/Pendidikan 9. Pengajuan pengangkatan cpns menjadi pns 10. Pembuatan Daftar Norminatif 11. Pengajuan Daftar Urut Kepangkatan 12. Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat 13. Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala 	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	75 Persen	Kasubbag Umum		Pemberian layanan kepegawaian	
		Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	<p>Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Agenda Surat Masuk 2. Pembuatan Agenda Surat Keluar 3. Pengelolaan Arsip/Dokumen/Laporan Kegiatan BBPPMD Jakarta 	Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	12 Bulan	Kasubbag Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan surat masuk 2. Pencatatan surat keluar 3. Pendataan arsip surat masuk 4. Pendataan arsip surat keluar 5. Pengelolaan arsip terpadu 	
		Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	<p>Layanan operasional dan pemeliharaan yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Barang Inventaris Milik Negara 2. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 	Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	12 Bulan	Kasubbag Umum	4.419.764.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 2. Layanan Umum 3. Pemeliharaan dan op perkantoran 4. Belanja Modal 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana 6. Pengelolaan Kepegawaian 	
JUMLAH								12.163.588.000	



**PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI JAKARTA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Enirawan
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Luthfiyah Nurlaela
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,

Luthfiyah Nurlaela

Pihak Pertama,

Enirawan

PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI JAKARTA
TAHUN 2023

A. Sasaran Target Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.1	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	330	Orang
2	Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	2.1	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	27	Orang
		2.2	Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023	630	Orang
3	Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan Melalui Pendampingan	3.1	Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitas dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan	8	Lembaga
4	Terlaksananya Pendampingan Masyarakat Oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.1	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat	85	Persen
5	Terlaksananya Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	5.1	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023	1	Desa
6	Terpenuhinya Dokumen Pendukung Yang Disusun Dalam Rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6.1	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMD Jakarta dalam satu tahun	12	Dokumen
		6.2	Jumlah Dokumen perencanaan	2	Dokumen

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
		6.3	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan	28	Dokumen
		6.4	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMD Jakarta	90,00	Persen
7	Terwujudnya Pelayanan Publik ASN Lingkup BBPPMD Jakarta Atas Pelayanan Dukungan Manajemen	7.1	Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	12	Bulan
		7.2	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	75,00	Persen
		7.3	Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	12	Bulan
		7.4	Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	12	Bulan

B. Kegiatan dan Anggaran

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rp 3.596.692.000 <i>(Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)</i>
2	Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rp 8.566.896.000 <i>(Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)</i>
	Jumlah	Rp 12.163.588.000 <i>(Dua Belas Milyar Setaus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)</i>

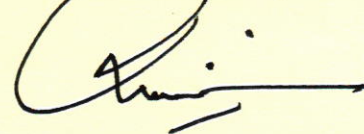
Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,



Luthfiyah Nurlaela

Pihak Pertama,



Enirawan



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Enirawan**, Jabatan Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Jakarta, Desember 2023

Menyaksikan:
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Luthfiyah Nurlaela

Pembuat Pernyataan :
Kepala Balai Besar Pelatihan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Jakarta,

Enirawan